RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023 – 2026

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah dapat disusun dengan baik.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sampai adanya Gubernur terpilih dari hasil Pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026;

Mengingat masa jabatan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017-2022 berakhir pada Tahun 2022 dan otomatis berakhir pula masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 maka sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026 dan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026;

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi

RPJPD Provinsi, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Tahap Keempat, dan isu strategis actual

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang penyusunannya dengan memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025;

3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun 2017-2022;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD Provinsi dengan mempehatikan :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau RenjaPD sampai dengan Tahun 2021;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/Subkegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkai dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut. Selain itu, Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik berupa pemikiran dan masukan sehingga dokumen Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ini dapat tersusun dengan baik. Semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah dan kemajuan pembangungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEP. BANGKA BELITUNG

Dr. Drs. NAZIARTO, SH., MH
NIP. 19640321 199103 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah 12

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 12

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Kpeulauan Bangka Belitung 16

2.3 Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Struktur Sekretariat Daerah ... 210

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 214

3.1 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga 210

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 217

3.3 Telaah Renstra Kabupaten/Kota 219

BAB IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 220

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 220

4.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah 227

BAB V Strategis dan Arah Kebijakan 229

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Sekretariat Daerah 233

BAB VI Rencana, Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Provinsi Kepualauan Bangka Belitung 234

6.1 Tabel Rencana, Program Kegiatan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah 235

BAB VII Kinerja Urusan Penyelenggaran Bidang Urusan 247

BAB VIII Penutup 248

B A B I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan atas berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang. Terdapat 4 (empat) elemen dasar perencanaan, yaitu (1) merencanakan berarti memilih, (2) perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, (3) perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan (4) perencanaan untuk masa depan. Perencanaan memiliki arti yang penting bagi suatu pemerintahan seiring dengan kewenangan yang dimiliki untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat provinsi, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner, 2001). Sebagai perencanaan yang berorientasi ke depan dalam upaya untuk membangun masyarakatberbasis perspektif kebutuhan maka penyusunan rencana strategisperlu didasarkan pada partisipasi masyarakat; data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara

terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Dalam pelaksanaan tatakelola pemerintahan, baik nasional maupun daerah, organisasi pemerintah yang dibentuk wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) organisasinya sebagai represetasi dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari pembentukan organisasi itu sendiri.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 secara sistematis untuk kurunwaktu 4 (empat) tahun. Dokumen Renstra Setda memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam penyusunan Renstra tersebut harus juga mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksaanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, dan terutama yang menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan..

Oleh karenanya, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPMJD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (1), bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD". Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuaidengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Mempedomani aturan tersebut, maka Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk guna melaksanakan fungsi Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi dan pelayanan administratib, pembinaan pegawai ASN pada Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra PD Tahun 2023-2026 yang berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah BerakhirPada Tahun 2022. Mengingat masa jabatan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017-2022 berakhir pada Tahun 2022 dan otomatis berakhir pula masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 maka sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026 dan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026;

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD Provinsi dengan mempehatikan :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/Subkegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome)
4. Isu-isu strategis yang terkai dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;

6. Regulasi yang berlaku
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut. Selain itu, Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telahditetapkan.

Dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Sekretariat Daerah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Setda, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar dalam penyusunan dokumen Renstra harus memiliki hubungan yang sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi KepulauanBangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 78 Seri F).

20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68A Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 12 Seri D);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 adalah untuk:

a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat, dan Isu strategis actual menjadi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun2022;

b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

c. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.

d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama berkenaaan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

e. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

f. Mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 adalah untuk :

a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Setda sebagai institusi yang menpunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasiaan administratib terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratib.
b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Setda.
c. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab dan disusun dalam sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab. 1 Pendahuluan;

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab. 2 Gambaran Pelayanan SETDA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur SETDA

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Setda, struktur organisasi Setda, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Sekretaris Daerah (Sekda) Uraian tentang struktur organisasi Setda tersebut ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya SETDA Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh Setda dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan SETDA

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Setda berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Setda dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SETDA Bagianini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SETDA kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Setda pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab. 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SETDA.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahanpermasalahan pelayanan Setda beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Setda yang terkait dengan visi, misi, serta program Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Setda, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Setda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Setda.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Setda Kabupaten/Kota.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Setda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Setda kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambatdan pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Setda ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Setda ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Setda;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Setda kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Setda; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Setda.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Setda pada tahun rencana.

Bab. 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Setda.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab. 5 Strategi dan Arah Kebijakan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Setda dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab. 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab. 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Setda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Setda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab. 8 Penutup

BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah mempunyai Tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan secara administratif. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi.
d. Pelayanan Administratif dan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah.
e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Guna mendukung tugas dan fungsi tersebut, secara struktural, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari : 1 (Satu) Sekretaris Daerah, 3 (Tiga) Assisten, 3 (tiga) Staf Ahli, 7 (tujuh) Kepala Biro, 12 Kepala Bagian, 9 (Sembilan) Koordinator, 7 (tujuh) Kasubbag TU, dan 54 (lima puluh empat) Sub Koordinator.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
   1. Biro Pemerintahan, membawahkan:
      i. Koordinator Administrasi Kewilayahan, terdiri dari :
         a. Sub Koordinator Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah.
         b. Sub Bagian Tata Usaha.
         c. Sub Koordinator Administrasi Pertanahan.

d. Koordinaor Otonomi Daerah, terdiri dari :

e. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan danOtonomi Daerah.

f. Sub Koordinator Fasilitasi Kepala Daerah dan Legislatif.

g. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan.

ii. Koordinator Kerja Sama, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Fasilitasi Instansi Vertikal.

b. Sub Koordinator Kerja sama Swasta dan Luar Negeri.

c. Sub Koordinator Kerja sama Antar Daerah.

2. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

i. Koordinator Fasilitasi Kegamaan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha.

b. Sub Koordinator Urusan Perhajian, Wakaf dan Zakat.

c. Sub Koordinator Kelembagaan dan Bina Kerukunan Beragama.

ii. Koordinator Pendidikan dan Pariwisata, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

b. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

iii. Koordinator Sosial, Kesehatan dan Transmigrasi, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Kesehatan.

b. Sub Koordinator Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Biro Hukum, membawahkan :

i. Koordinator Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Peraturan Daerah.

b. Sub Koordinator Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

c. Sub Koordinator Naskah Hukum Lainnya.

ii. Koordinator Pelayanan Hukum, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Sengketa Hukum

b. Sub Koordinator Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi

Hukum

c. Sub Koordinator Penyeluhan Hukum dan Hak Azasi Manusia.

iii. Koordinator Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan Hukum.

b. Sub Koordinator Publikasi Informasi Hukum.

c. Sub Bagian Tata Usaha.

II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, membawahkan :

i. Koordinator Adminstrasi Perekonomian dan Perencanaan, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Analisis Makro Ekonomi dan Prasarana Perekonomian.

b. Sub Koordinator Perencanaan Program Sekretariat Daerah.

c. Sub Bagian Tata Usaha.

ii. Koordinator Sumber Daya Alam, BUMD dan Penyertaan Modal, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah.

b. Sub Koordinator Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. Sub Koordinator Pariwisata dan Budaya, BUMD, Penyertaan Modal.

iii. Koordinator Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Pengendalian Pembangunan.

b. Sub Koordinator Analisis dan Pengkajian Pembangunan.

c. Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.

2. Biro Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan :

i. Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Pengelolaan Strategi Pengadaan

Barang/Jasa.

b. Sub Koordinator Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

c. Sub Koordinator Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.

ii. Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

b. Sub Koordinator Pengembangan Sistem Informasi.

c. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa.

iii. Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

b. Sub Koordinator Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa.

c. Sub Koordinator Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

III. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Biro Organisasi, membawahkan :

i. Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Analisis Organisasi.

b. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

c. Sub Koordinator Analisi dan Formasi Jabatan.

ii. Koordinator Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Akuntabilitas Kinerja.

b. Sub Koordinator Reformasi Birokrasi.

c. Sub Koordinator Budaya Kerja.

iii. Koordinator Tata Laksana, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Tata Laksana Pemerintahan.

b. Sub Koordinator Tata Laksana Pelayanan Publik.

c. Sub Bagian Tata Usaha.

2. Biro Umum, membawahkan :

i. Koordinator Rumah Tangga dan Protokol, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Rumah Tangga.

b. Sub Koordinator Protokol.

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Staf Ahli.

ii. Koordinator Perlengkapan, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan.

b. Sub Koordinator Pengandaan dan Pemeliharaan.

c. Sub Koordinator Inventarisasi dan Penyimpanan.

iii. Koordinator Keuangan, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Urusan Gaji.

b. Sub Koordinator Perjalanan Dinas.

c. Sub Koordinator Perbendaharaan.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

V. Staf Ahli

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil termasuk honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 527 orang, untuk komposisi pegawai/honorer beserta tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel dan Diagram berikut.

TABEL II.1

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN ESELON

NO	JABATAN	JUMLAH
1	ESELON I	1
2	ESELON II	13
3	ESELON III	21
4	JABATAN FUNGSIONAL	61
5	JFU/JFT/CPNS	283
6	HONORER	204
Total		**600**

DIAGRAM 2.1
KOMPOSISI PEGAWAI DAN HONORER SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

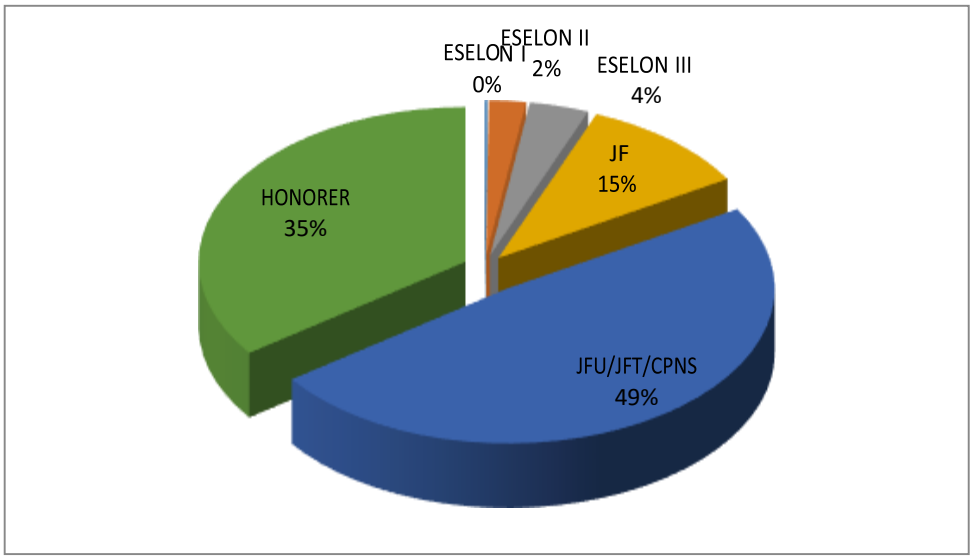

2. Tingkat Pendidikan Pegawai

Tingkat pendidikan formal pegawai dan honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.2

TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL PEGAWAI DAN HONORER SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	4
2	S2	39
3	S1	330
4	D4	4
5	D3	23
6	D1	3
7	SMA	174
8	SMP	16
9	SD	7
Total		**600**

DIAGRAM 2.2

TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL PEGAWAI DAN HONORER SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

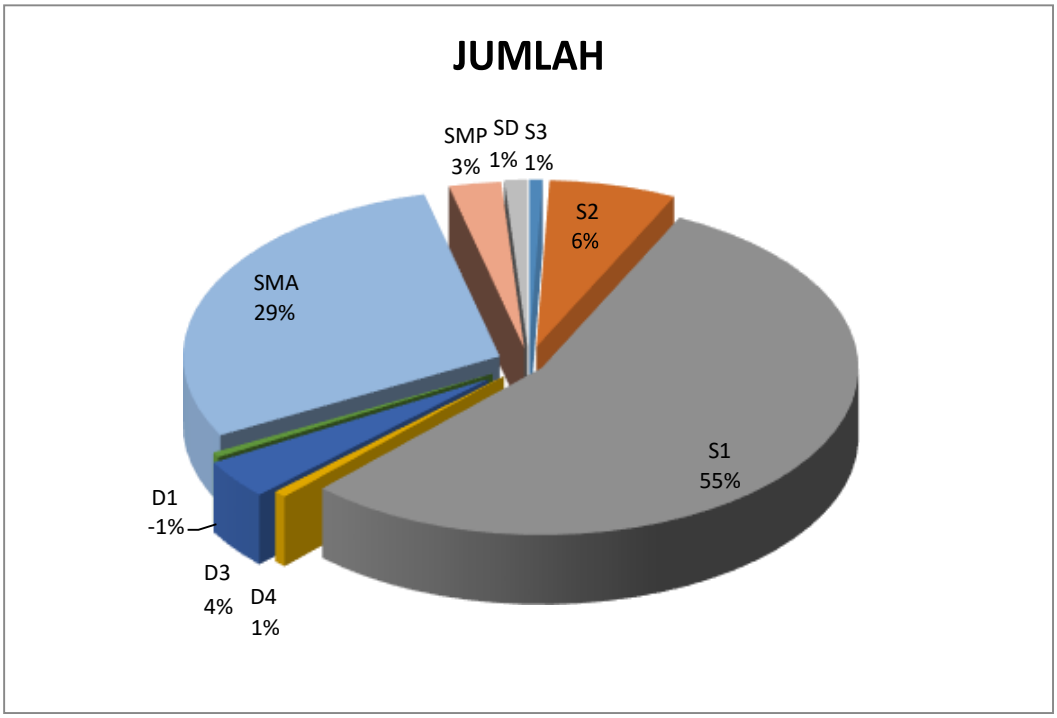

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan capaian kinerja PD yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang semula ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Ketercapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun pada Sekretariat Daerah masing-masing Biro adalah Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pelaksanaan program pembangunan selama lima tahun (2023-2026) dapat dilihat pada tabel II.3

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah				**48.394.471.715**	**50.942.622.648**	**53.489.753.780**			**44.857.635.463**	**48.258.596.839**	**38.020.661.672**			**92,69%**	**94,73%**	**71,08%**		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				25.427.230.605	26.765.505.900	28.103.781.195			27.231.925.246	25.543.271.314	20.229.822.532			107,10%	95,43%	71,98%		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				18.575.761.110	19.553.432.748	20.531.104.385			14.122.244.847	20.413.800.617	15.676.124.408			76,03%	104,40%	76,35%		
	Peningkatan Disiplin Aparatur				982.720.000	1.031.856.000	1.083.448.800			998.064.000	350.500.000	81.337.500			101,56%	33,97%	7,51%		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				559.400.000	600.000.000	630.000.000												
	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah				2.849.360.000	2.991.828.000	3.141.419.400			2.505.401.370	1.951.024.908	2.033.377.232			87,93%	65,21%	64,73%		
	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian				**818.556.850**	**1.306.000.000**	**1.366.000.000**			**385.876.240**	**1.467.475.409**	**58.370.721**			**47,14%**	**112,36%**	**4,27%**		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	0	0												
	Monitoring pengawasan supplay dan demand barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	101.000.000	101.000.000												
	Monitoring dan Evaluasi Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				100.000.000	100.000.000	125.000.000				37.160.000	2.625.000				37,16%	2,10%		
	Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka belitung				198.500.000	310.000.000	320.000.000			112.151.410	46.036.788	13.563.098			56,50%	14,85%	4,24%		
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	125.000.000	130.000.000				31.795.200	2.625.000				25,44%	2,02%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	0	0												
	Monitoring dan Evaluasi pengembangan industri hilir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	0	0												
	Monitoring,Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				117.856.050	220.000.000	230.000.000			80.128.920	74.579.800	2.625.000			67,99%	33,90%	1,14%		
	Monitoring dan Evaluasi Analisis Ekonomi Makro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				117.100.800	140.000.000	140.000.000			62.321.600	1.198.550.703	5.125.000			53,22%	856,11 %	3,66%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				166.000.000	100.000.000	100.000.000			65.843.612	34.363.300				39,66%	34,36%			
	Forum Pengembangan Ekonomi				119.100.000	210.000.000	220.000.000			65.430.698	44.989.618	3.125.000			54,94%	21,42%	1,42%		
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						2.625.000					2.625.000					100,00 %		
	Kegiatan Kerjasama IMT-GT Regional Sumatera dan Sekretariat IMT-GT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						26.664.810					23.432.623					87,88%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Berkah Mart di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						2.625.000					2.625.000					100,00 %		
	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam				**644.924.775**	**882.500.000**	**916.625.000**			**165.307.296**	**6.437.300**	**7.875.000**			**25,63%**	**0,73%**	**0,86%**		
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Penggunaan Subsidi listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	0	0												
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				153.324.000	162.500.000	162.500.000			87.750.221	1.600.000	2.625.000			57,23%	0,98%	1,62%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan serta Pengembangan Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				100.000.000	100.000.000	100.125.000				1.512.500	2.625.000				1,51%	2,62%		
	Monitoring dan evaluasi Perizinan Analisis mengenai Dampak LIngkungan (Amdal) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				50.000.000	70.000.000	104.000.000				1.812.400					2,59%			
	Kajian Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Fungsi Balai Benih Pertanian, Kelautan dan Perikanan				0	0	0												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Komoditi Pangan				137.765.700	150.000.000	150.000.000			77.557.075	1.512.400	2.625.000			56,30%	1,01%	1,75%		
	Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan di PRovinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	0	0												
	Monitoring dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan masalah Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				203.835.075	400.000.000	400.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi komoditi lada di Prov.Kep.Babel				0	0	0												
	Koordinasi Pemerataan dan percepatan penggunaan energi alternatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	0	0												
	Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya				**2.350.877.200**	**3.260.000.000**	**2.200.000.000**			**481.432.826**	**399.309.341**	**37.875.000**			**20,48%**	**12,25%**	**1,72%**		
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kajian potensi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	0	0												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung				762.011.400	1.500.000.000	200.000.000			267.932.428	26.528.600				35,16%	1,77%			
	Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				117.100.800	150.000.000	200.000.000			61.594.482	149.716.960	2.625.000			52,60%	99,81%	1,31%		
	Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				100.000.000	120.000.000	220.000.000			40.645.741	1.000.000	32.625.000			40,65%	0,83%	14,83%		
	Penyusunan Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				300.000.000	320.000.000	340.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kajian dan Penyusunan Perlindungan Benda Cagar Budaya atau Benda diduga cagar budaya				300.000.000	320.000.000	340.000.000				138.535.993				0,00%	43,29%			
	Kajian Strategis Destinasi Wisata Baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				100.000.000	120.000.000	140.000.000			57.730.235					57,73%				
	Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				99.100.000	150.000.000	160.000.000			53.529.940	83.527.788				54,02%	55,69%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyusunan SOP BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				349.845.000	350.000.000	360.000.000												
	Pemetaan Potensi Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				222.820.000	230.000.000	240.000.000												
	Kegiatan Pengembangan Kemitraan BUMD						3.750.000,00					2.625.000					70,00%		
	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN				**475.514.731**	**1.407.072.623**	**1.208.633.140**			**303.465.842**	**41.326.524**				**63,82%**	**2,94%**			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem e-Monep APBN				257.308.000	436.643.000	429.852.588			173.158.600	23.736.524				67,30%	5,44%			
	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBN				161.256.731	243.864.764	280.444.479			99.698.458	17.590.000				61,83%	7,21%			
	Koordinasi Kebijakan APBN				56.950.000	161.200.000	185.380.000			30.608.784					53,75%				
	Penyusunan Pergub / Revisi Pergub tentang Pengendalian Dana APBN				0	150.000.000	0												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyusunan Kebijakan Implementasi Jaringan Aplikasi E-Monep APBN				0	165.000.000	0												
	Pemuthahiran Aplikasi E-Monep APBN				0	0	0												
	Penggunaan Aplikasi E-Monep APBN				0	250.364.859	312.956.073												
	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan				**5.385.583.757**	**700.574.000**	**5.735.910.000**			**279.036.511**	**1.677.192.804**	**73.572.800**			**5,18%**	**239, 40%**	**1,28%**		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Sengketa Pertanahan di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	81.300.000	85.300.000												
	Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung				108.400.000	118.345.000	124.260.000			107.444.000	511.024.920	19.493.400			99,12%	431,81%	15,69%		
	Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				59.244.500	108.129.000	113.500.000			38.275.950					64,61%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan, Dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan)				124.370.500	157.000.000	165.300.000			96.380.086					77,49%				
	Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas daerah				48.806.282	105.000.000	110.250.000			36.596.475					74,98%				
	Kegiatan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung				94.762.475	130.800.000	137.300.000			340.000					0,36%				
	Pengadaan Lahan				4.950.000.000	0	5.000.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Internal Biro Pemerintahan.					824.106.725					817.076.004					99,15%			
	Pembinaan Penanganan Masalah Konflik Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitug.					104.100.000					87.167.560					83,73%			
	Penyusunan Sistem Informasi Data Administrasi Kewilayahan.					44.440.000	11.095.400				4.745.000	11.095.400				10,68%	100,00%		
	Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi.					23.918.000					9.620.000					40,22%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penegasan Batas Daerah.					313.159.000	43.668.000				247.559.320	42.984.000				79,05%	98,43%		
	Program Pengembangan Otonomi Daerah				**1.448.652.830**	**2.638.074.000**	**2.772.705.000**			**1.413.000.098**	**741.778.578**	**890.469.627**			**97,54%**	**28,12%**	**32,12%**		
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)				165.953.745	327.905.000	347.905.000			140.541.200	119.637.500	448.816.613			84,69%	36,49%	129,01%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017				351.810.000	367.500.000	386.500.000			366.541.760	223.520.935				104,19 %	60,82%			
	Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				276.971.408	467.000.000	490.000.000			270.029.102	157.824.339				97,49%	33,80%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Desk Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				143.257.000	262.500.000	275.100.000			139.929.889					97,68%				
	Kegiatan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan KDH dan WKDH				116.415.704	210.000.000	220.000.000			108.585.850					93,27%				
	Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota				0	157.000.000	165.375.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri				74.753.565	157.000.000	165.375.000			71.195.000	25.945.683	95.046.790			95,24%	16,53%	57,47%		
	Rapat koordinasi optimalisasi penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan Otonomi Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung				116.015.704	229.587.000	241.100.000			115.537.239					99,59%				
	Rapat koordinasi penerapan pelaksanaan NSPK di Prov. Kep. Bangka Belitung				101.165.704	229.582.000	241.100.000			99.056.702					97,92%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan internal Biro Pemerintahan				0	105.000.000	110.250.000												
	Workshop Penataan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				102.310.000	125.000.000	130.000.000			101.583.356					99,29%				
	Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.					77.200.000					46.501.900					60,24%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Legislative dan Pilpres 2019.					6.200.000					6.200.000					100,00 %			
	Verifikasi Berkas Calon Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.					88.860.000					84.552.140					95,15%			
	Optimalisasi Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.					78.940.000					77.596.081					98,30%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan administrasi penatausahaan biro pemerintahan						350.238.666				346.606.224						0,00%		
	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah				**1.639.284.704**	**1.665.551.000**	**1.726.311.000**			**1.470.581.335**	**666.498.578**	**1.713.010.579**			**89,71%**	**40,02%**	**99,23%**		
	Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				220.949.000	382.389.000	401.508.000			108.146.940	328.603.278	278.174.076			48,95%	85,93%	69,28%		
	Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI				101.320.000	230.464.000	241.980.000			115.197.110	90.825.000	94.450.000			113,70 %	39,41%	39,03%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan				137.765.704	260.284.000	273.290.000			150.000.000	150.260.000				108,88 %	57,73%			
	Kegiatan Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD				0	78.629.000	82.560.000				13.545.000	1.860.000				17,23%	2,25%		
	Kegiatan Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama				197.400.000	144.411.000	151.631.000			196.445.495	55.369.300	1.338.526.503			99,52%	38,34%	882,75 %		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Inventarisasi potensi kerjasama				93.150.000	119.374.000	125.342.000			90.986.722	11.558.500				97,68%	9,68%			
	Kegiatan Penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat				888.700.000	450.000.000	450.000.000			809.805.068	16.337.500				91,12%	3,63%			
	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan				**8.394.550.000**	**12.728.933.000**	**11.595.068.000**			**7.429.257.519**	**8.717.697.220**	**1.165.206.927**			**88,50%**	**68,49%**	**10,05%**		
	Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung				1.335.332.000	1.502.648.000	1.552.648.000			1.311.814.146	1.910.470.871	466.400.998			98,24%	127,14 %	30,04%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan				616.530.000	675.100.000	725.100.000			524.025.500	470.454.000	463.984.000			85,00%	69,69%	63,99%		
	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji				903.270.000	998.600.000	1.048.600.000			703.356.171	545.075.000	142.383.329			77,87%	54,58%	13,58%		
	Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung				488.088.000	554.080.000	604.080.000			477.761.010	468.950.000	86.063.600			97,88%	84,64%	14,25%		
	Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji				3.170.920.000	3.250.000.000	3.300.000.000			2.912.188.990	3.354.413.792	6.375.000			91,84%	103,21 %	0,19%		
	Persiapan Musabaqah Hafidz Qur'an Internasional				500.000.000	2.372.040.000	2.422.040.000			345.107.266					69,02%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pembinaan dan Pemberangkatan Khafilah STQ Nasional				1.380.410.000	1.506.600.000	1.556.600.000			1.155.004.436	763.188.457				83,67%	50,66%			
	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama				0	336.000.000	386.000.000												
	Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah Prov. Kep. Babel				0	534.965.000	0				398.516.000					74,49%			
	Pembinaan dan Pemberangkatan Kontingen POSPENAS				0	998.900.000	0				806.629.100					80,75%			
	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata				**1.323.400.000**	**2.010.920.000**	**2.160.920.000**			**969.398.600**	**791.989.000**	**315.246.000**			**73,25%**	**39,38%**	**14,59%**		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				297.820.000	384.090.000	434.090.000			220.120.500	112.335.200				73,91%	29,25%			
	Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				1.025.580.000	1.096.630.000	1.146.630.000			749.278.100	679.653.800	315.246.000			73,06%	61,98%	27,49%		
	Koordinasi Bidang Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata				0	530.200.000	580.200.000												
	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi				**535.189.000**	**1.067.422.000**	**1.217.422.000**			**317.196.650**	**78.461.400**	**206.104.700**			**59,27%**	**7,35%**	**16,93%**		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi				0	430.233.000	480.233.000				58.346.400					13,56%			
	Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah				333.985.000	383.985.000	433.985.000			188.585.600	9.125.000	110.215.000			56,47%	2,38%	25,40%		
	Evaluasi dan Analisi Proposal Bansos dan Hibah				201.204.000	253.204.000	303.204.000			128.611.050	10.990.000	95.889.700			63,92%	4,34%	31,63%		
	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan				**1.912.323.600**	**3.420.000.000**	**3.710.000.000**			**1.711.488.044**	**206.849.700**	**817.953.834**			**89,50%**	**6,05%**	**22,05%**		
	Penyusunan Propemperda Dan Rancangan Peraturan Daerah				959.843.600	1.500.000.000	1.550.000.000			896.008.774	83.325.000	415.140.934			93,35%	5,56%	26,78%		
	Penyusunan Produk Hukum Daerah				567.480.000	500.000.000	600.000.000			526.255.384	118.623.500	230.727.682			92,74%	23,72%	38,45%		
	Penyusunan Naskah Hukum Lainnya				67.220.000	150.000.000	170.000.000			65.753.457	600.000	24.509.100			97,82%	0,40%	14,42%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota				0	420.000.000	440.000.000					73.414.364					16,69%		
	Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				317.780.000	400.000.000	430.000.000			223.470.429	4.301.200	74.161.754			70,32%	1,08%	17,25%		
	Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota				0	160.000.000	180.000.000												
	Rapat Koordinasi Program Pembentukan Peraturan Daerah				0	140.000.000	170.000.000												
	Bimbingan Teknis Legal Drafting				0	150.000.000	170.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah				**955.806.626**	**1.816.000.000**	**1.970.046.250**			**728.136.127**	**189.585.700**	**192.965.950**			**76,18%**	**10,44%**	**9,79%**		
	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi				170.370.000	300.000.000	320.000.000			126.469.039	19.660.000	44.033.600			74,23%	6,55%	13,76%		
	Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda				191.528.000	300.000.000	320.000.000			125.137.088	84.693.700	72.147.800			65,34%	28,23%	22,55%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				93.865.626	150.000.000	170.000.000			85.266.600	4.609.000	17.709.500			90,84%	3,07%	10,42%		
	Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				94.444.000	210.000.000	240.000.000			86.619.800	5.490.000	17.475.050			91,72%	2,61%	7,28%		
	Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				156.966.000	230.000.000	260.000.000			106.676.700	75.133.000	41.600.000			67,96%	32,67%	16,00%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten/Kota				248.633.000	350.000.000	370.000.000			197.966.900					79,62%				
	Penyuluhan HAM				0	136.000.000	140.046.250												
	Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemerintah Daerah				0	140.000.000	150.000.000												
	Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum				**750.391.500**	**1.510.000.000**	**1.670.000.000**			**467.324.563**	**1.277.898.260**	**20.890.800**			**62,28%**	**84,63%**	**1,25%**		
	Pengelolaan dan Pengembangan JDIH				482.138.000	600.000.000	650.000.000			364.166.560	1.277.898.260	3.000.000			75,53%	212,98 %	0,46%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum				61.658.000	85.000.000	90.000.000			35.978.890					58,35%				
	Penyusunan Katalog Perda dan Pergub dan Kompilasi Perda dan Pergub				69.125.500	85.000.000	90.000.000			67.179.113					97,18%				
	Penyusunan Abstar Produk Hukum Daerah				0	120.000.000	140.000.000												
	Penyusunan Arsip Produk Hukum Daerah				0	85.000.000	90.000.000												
	Pembinaan Pelaksanaan JDIH Kabupaten/Kota				0	0	0												
	Sosialisasi Perda				0	95.000.000	110.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				137.470.000	170.000.000	190.000.000			120.967.425	39.049.700	17.890.800			88,00%	22,97%	9,42%		
	Publikasi Produk Hukum Daerah di Media				0	0	0												
	Bimtek Sistem Informasi Hukum				0	140.000.000	160.000.000												
	Rakor JDIH Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				0	130.000.000	150.000.000												
	Program Perencanaan Setda				**301.467.968**	**428.313.000**	**492.559.950**			**160.507.629**	**49.724.600**	**46.765.600**			**53,24%**	**11,61%**	**9,49%**		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				149.599.950	202.610.000	233.001.500			70.064.930	23.345.350	23.416.550			46,83%	11,52%	10,05%		
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah				151.868.018	225.703.000	259.558.450			90.442.699	26.379.250	23.349.050			59,55%	11,69%	9,00%		
	Program Pengendalian Pembangunan Daerah				**779.993.020**	**1.549.651.606**	**1.780.849.347**			**604.834.881**	**744.141.427**				**77,54%**	**48,02%**			
	Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota				108.080.000	380.450.000	437.517.500			79.192.073	744.141.427				73,27%	195,60 %			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Peningkatan Fungsi Sistem Monitoring TEPRA (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota				578.951.855	662.436.606	761.802.097			381.482.888					65,89%				
	Peningkatan Pengendalian Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				92.961.165	331.765.000	381.529.750			56.795.500					61,10%				
	Koordinasi Penetapan Target Fisik dan Keuangan APBD Provinsi				0	175.000.000	200.000.000			87.364.420									
	Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd				**501.326.670**	**1.982.884.194**	**1.959.232.094**			**134.477.490**	**121.879.500**				**26,82%**	**6,15%**			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Peningkatan Fungsi Sistem E-Monep APBD				0	602.328.194	627.328.194				26.202.000					4,35%			
	Koordinasi Penyempurnaan Aplikasi e-Monep APBD				398.674.000	538.326.000	619.074.900			94.091.990					23,60%				
	Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD				102.652.670	152.650.000	175.547.500			40.385.500					39,34%				
	Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Jaringan Aplikasi e-Monev berkelanjutan				0	0	250.000.000												
	Penggunaan Aplikasi E-Monep APBD				0	0	0												
	Peningkatan Capaian Realisasi APBD				0	225.620.000	0				76.175.000					33,76%			
	Peningkatan Fungsi Sismontepra APBD Provinsi, Kab/Kota				0	463.960.000	287.281.500				19.502.500					4,20%			
	Program Pengembangan Data Informasi Layanan				**554.899.000**	**1.446.989.500**	**1.591.688.450**			**323.373.394**	**889.597.497**	**82.250.300**			**58,28%**	**61,48%**	**5,17%**		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengadaan																		
	Peningkatan penerapan data dan informasi layanan				211.370.000	533.841.000	587.225.100			119.594.454	8.100.000				56,58%	1,52%			
	Pengelolaan data dan informasi				125.128.000	259.050.000	284.955.000			46.860.950	13.665.200	18.247.200			37,45%	5,28%	6,40%		
	Peningkatan Administrasi Ketatausahaan				112.637.000	411.235.000	452.358.500			71.708.770	28.437.600	44.501.100			63,66%	6,92%	9,84%		
	Peningkatan Pelayanan Publik				105.764.000	242.863.500	267.149.850			85.209.220	13.665.200	19.502.000			80,57%	5,63%	7,30%		
	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa				**2.337.898.000**	**5.034.568.000**	**5.538.024.800**			**1.806.991.211**	**1.030.944.311**	**927.437.874**			**77,29%**	**20,48%**	**16,75%**		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP				1.927.350.000	3.540.240.000	3.894.264.000			1.602.033.069	891.787.698	927.437.874			83,12%	25,19%	23,82%		
	Peningkatan Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa				183.145.000	495.429.000	544.971.900			98.654.959	66.150.094				53,87%	13,35%			
	Peningkatan pelayanan perencanaan Pengadaan barang dan jasa				111.378.000	404.888.000	445.376.800			45.669.800					41,00%				
	Pencegahan dan Penanganan Pengaduan				116.025.000	594.011.000	653.412.100			60.633.383	73.006.519				52,26%	12,29%			
	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				**2.539.128.000**	**5.020.020.500**	**5.522.022.550**			**1.814.816.030**	**1.653.776.602**	**605.590.734**			**71,47%**	**32,94%**	**10,97%**		
	Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1.195.925.000	2.116.136.000	2.327.749.600			1.058.917.331	952.296.951	476.654.850			88,54%	45,00%	20,48%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik				459.493.000	962.824.500	1.059.106.950			256.749.433	138.556.488				55,88%	14,39%			
	Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi				308.280.000	781.825.000	860.007.500			94.816.455	98.134.063				30,76%	12,55%			
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				575.430.000	1.159.235.000	1.275.158.500			404.332.811	464.789.100	128.935.884			70,27%	40,09%	10,11%		
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisisi Jabatan				**2.047.186.525**	**952.670.000**	**1.067.670.000**			**388.834.028**	**244.708.431**	**245.772.197**			**18,99%**	**25,69%**	**23,02%**		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				81.146.000	132.670.000	142.670.000			51.978.830					64,06%				
	Evaluasi Kelembagaan UPTD/Cabdin Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					14.070.000,00					13.155.000					93,50%			
	Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Beliltung					37.114.500,00					32.553.478	29.946.911				87,71%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						46.078.080					45.600.748					98,96%		
	Pembinaan uraian tugas perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				133.810.000														
	Pembinaan kelembagaan UPTD/UPTB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				74.827.500	160.000.000	180.000.000			49.076.700					65,59%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sinkronisasi fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				87.240.000														
	Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016				170.000.000														
	Pembinaan kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota				83.475.000	150.000.000	175.000.000			11.582.000	1.510.000	51.632.400			13,87%	1,01%	29,50%		
	penyusunan profil aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				89.765.000														

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Evaluasi jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				74.751.945	160.000.000	170.000.000			72.772.468					97,35%				
	Bimbingan teknis penyusunan standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				243.553.000														

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyusunan standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				113.207.580	130.000.000	170.000.000			81.816.000					72,27%				
	Validasi Analisis Beban Kerja Jabatan Aparatur Sipil negara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.				201.805.000						102.284.885	82.900.138							

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Validasi Standar Kopetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					59.950.000,00					48.740.239					81,30%			
	Validasi dan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.				233.510.000						46.464.829	35.692.000							
	Pembinaan dan analisa jabatan dan beban kerja				195.087.500	220.000.000	230.000.000			121.608.030					62,34%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional tertentu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				265.008.000														
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah				**2.868.168.893**	**4.115.000.000**	**3.922.000.000**			**375.650.482**	**191.195.562**	**238.172.418**			**13,10%**	**4,65%**	**6,07%**		
	Penyusunan Profil Aparatur jabatan struktural				115.000.000	145.000.000	165.000.000												
	Forum Sekretaris Daerah Prov.babel				50.241.497	175.000.000	185.000.000			29.347.500	10.294.350				58,41%	5,88%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pembinaan dan Evaluasi Profil Aparatur UPT Pemprov Babel				33.615.875	145.000.000	175.000.000			22.764.000					67,72%				
	Pengadaan aplikasi e-Sakip/penerapan aplikasi e-Sakip				150.000.000	175.000.000	175.000.000												
	Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				67.424.000	215.000.000	225.000.000			46.092.540	72.981.919				68,36%	33,95%			
	Pembinaan laporan kinerja				175.000.000	200.000.000	225.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Bimbingan teknis E-LHKPN				106.301.000	165.000.000	187.000.000			87.578.650					82,39%				
	Pembangunan zona integritas				125.000.000	150.000.000	175.000.000												
	Rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah				127.570.000	200.000.000	220.000.000			80.799.330					63,34%				
	Bimbingan teknis pengisian LHKPN				112.500.000	175.000.000	180.000.000												
	Penyusunan laporan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				75.331.000	175.000.000	225.000.000			62.002.677	19.965.000				82,31%	11,41%			
	Penyusunan pedoman indikator kinerja utama				225.000.000	250.000.000	0												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyusunan Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja ASN				250.000.000	270.000.000	275.000.000												
	Rakor pencapaian indikator kinerja utama				125.000.000	150.000.000	175.000.000												
	Penyusunan database capaian kinerja individu				225.000.000	250.000.000	0												
	Penyusunan standar capaian kinerja individu ASN				250.000.000	270.000.000	275.000.000				20.448.200					7,57%			
	Penyusunan standar reward capaian kinerja individu dan perangkat daerah				250.000.000	270.000.000	275.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung				63.309.781	270.000.000	275.000.000				66.116.593	24.382.400				24,49%	8,87%		
	Forum Staf Ahli Kepala Daerah				175.000.000	185.000.000	195.000.000												
	Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				72.140.240	120.000.000	140.000.000			47.065.785	1.389.500				65,24%	1,16%			
	Bimbingan teknis penyusunan capaian kinerja individu ASN di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung				94.735.500	160.000.000	175.000.000												

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Manajemen Perubahan						98.178.800					97.137.538					98,94%		
	Penigkatan Akuntabilitas Kinerja						59.060.050					56.564.052					95,77%		
	Data dan Informasi Kinerja						61.019.237					60.088.428					98,47%		
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah				**852.840.935**	**1.900.000.000**	**2.035.000.000**			**499.237.123**	**1.214.630.908**	**307.169.845**			**58,54%**	**63,93%**	**15,09%**		
	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				85.119.480	170.000.000	190.000.000			66.988.810	134.466.370	10.755.798			78,70%	79,10%	5,66%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				48.999.680	150.000.000	200.000.000			28.105.100	750.000	89.936.261			57,36%	0,50%	44,97%		
	Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				88.991.825	170.000.000	190.000.000			61.050.090	18.474.390				68,60%	10,87%			
	Peningkatan administrasi ketatausahaan				72.493.150	285.000.000	300.000.000				881.499.851	149.557.804				309,30 %	49,85%		
	Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik				97.924.275	300.000.000	300.000.000			79.743.279	43.929.889	20.963.555			81,43%	14,64%	6,99%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Audit Surveillance ISO 9001:2008 menuju Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Samsat Sungailiat dan UPTSP				149.319.550	200.000.000	200.000.000												
	Peningkatan Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				100.324.275	200.000.000	200.000.000			77.883.764	115.650.408				77,63%	57,83%			
	Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				123.155.325	275.000.000	290.000.000			77.026.700	18.960.000				62,54%	6,89%			
	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik				86.513.375	150.000.000	165.000.000			57.779.900	900.000	35.956.427			66,79%	0,60%	21,79%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan standar pelayanan minimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				59.354.750,00					50.659.480					85,35%				
	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT				**2.193.142.400**	**3.503.023.340**	**4.020.448.841**			**1.878.528.389**	**1.366.525.000**	167.550.000			**85,65%**	**39,01%**	**4,17%**		
	Publikasi Media Massa / Cetak				1.467.700.000	2.242.500.000	2.578.875.000			1.409.825.139	796.375.000	117.765.000			96,06%	35,51%	4,57%		
	Publikasi Media Elektronik/IT				299.942.025	458.425.765	527.189.630			184.990.000	312.500.000	40.875.000			61,68%	68,17%	7,75%		
	Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho				163.901.900	260.899.580	300.034.517			123.760.750	153.975.000	8.910.000			75,51%	59,02%	2,97%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah Provinsi				241.827.425	378.407.385	435.168.492			159.952.500	103.675.000	-			66,14%	27,40%			
	Media Gathering				0	52.195.000	60.024.250												
	Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT				19.771.050	30.315.610	34.862.952			11.031.000					55,79%				
	Workshop Bidang Kehumasan				0	80.280.000	84.294.000												
	Program Peningkatan Pelayanan Protokoler				**162.698.250**	**535.354.305**	**585.657.450**			**48.870.000**	**180.074.100**	**87.514.147**			**30,04%**	**33,64%**	**14,94%**		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				66.562.500	78.846.875	90.673.906			48.870.000	79.070.000	9.957.500			73,42%	100,28 %	10,98%		
	Workshop Bidang Keprotokolan				96.135.750	221.802.225	225.072.558				101.004.100					45,54%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Layanan Tamu Pemerintah dan Negara				0	84.705.205	97.410.986												
	Peningkatan Fungsi Keprotokolan				0	150.000.000	172.500.000					77.556.647					44,96%		
	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi				**1.224.371.325**	**1.975.838.255**	**2.272.213.993**			**1.059.488.769**	**1.339.360.061**	169.492.761			**86,53%**	**67,79%**	**7,46%**		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				183.992.200	285.174.930	327.951.170			171.205.000	188.133.500	14.602.500			93,05%	65,97%	4,45%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengumpulan, Penyaringan informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah di rubah menjadi Pengumpulan Informasi, Layanan Kehumasan, dan keprotokolan				259.830.650	396.076.330	455.487.780			156.625.159	527.920.661	53.825.170			60,28%	133,29 %	11,82%		
	Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi				230.918.550	362.861.110	417.290.276			144.718.910	19.347.400	20.998.710			62,67%	5,33%	5,03%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan				533.821.375	792.152.775	910.975.691			578.155.000	603.958.500	74.775.700			108,30 %	76,24%	8,21%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan				15.808.550	39.573.110	45.509.076			8.784.700		5.290.681			55,57%		11,63%		
	Penyediaan Pakaian Khusus Lapangan Humas dan Protokol				0	100.000.000	115.000.000												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							185.000.000	203.500.000				########						34,32%
								###########	###########				########						81,76%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							185.000.000	203.500.000				########						34,32%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							166.000.000	180.000.000				########						23,74%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							19.000.000	23.500.000				########						126,75%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							##############	54.202.275.413				########						82,94%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							##############	54.202.275.413				########						82,94%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							200.000.000	200.000.000				########						73,05%
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							200.000.000	200.000.000				########						73,05%
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																		
	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
	Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah																		
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							310.000.000	341.000.000				-						0,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							160.000.000	176.000.000				-						0,00%
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																		
	Sub Kegiatan Pemindahan Tugas ASN																		
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							150.000.000	165.000.000				-						0,00%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							##############	13.820.311.405				########						83,59%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							788.511.638	867.362.800				########						21,49%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							75.000.000	82.500.000				########						26,43%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							75.000.000	82.500.000				-						0,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor							65.096.000	71.575.900				########						99,95%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							357.378.980	393.116.880				########						68,55%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							169.953.000	186.948.300				########						32,40%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material							400.000.000	410.000.000				########						83,53%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu							5.052.800.000	6.850.000.000				########						113,47%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							4.433.006.840	4.876.307.525				########						65,89%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2.500.000.000	2.800.000.000				########						78,39%
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							1.800.000.000	2.000.000.000				########						74,71%
	Pengadaan Alat Besar																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
	Pengadaan Mebel																		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							700.000.000	800.000.000				########						87,85%
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							##########	14.613.157.290				#######						89,34%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							4.941.500.000	5.435.650.000				#######						0,44%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							4.441.000.000	4.885.100.000				########						66,10%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							1.575.200.000	1.832.220.000				########						71,79%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							2.236.533.900	2.460.187.290				########						344,26%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							##############	13.660.818.446				########						62,36%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							3.280.173.150	3.608.190.465				########						20,83%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							2.188.164.150	2.406.980.565				########						61,01%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel							150.000.000	165.000.000				########						28,61%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							1.883.800.000	2.072.180.000				########						17,96%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							4.254.616.260	4.680.077.886				########						103,82%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							662.172.300	728.389.530				########						140,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1.642.246.217	1.780.000.000				########						94,64%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							245.046.217	265.000.000				########						98,16%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							82.200.000	90.000.000				########						26,76%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							65.000.000	75.000.000				########						64,04%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1.250.000.000	1.350.000.000				########						100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							2.051.800.723	2.100.000.000				########						80,77%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							583.709.644	600.000.000				########						141,39%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							278.137.296	300.000.000				########						204,74%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah							1.189.953.783	1.200.000.000				########						22,06%
	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan							72.850.000	80.000.000				########						1652,97%
	Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan							72.850.000	80.000.000				########						1652,97%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan							1.444.794.000	1.565.789.267				########						56,83%
	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara							945.744.000	1.000.000.000				########						2,48%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan							499.050.000	565.789.267				########						159,84%
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI							805.705.855	1.000.000.000				########						46,81%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan							265.000.000	345.000.000				#######						47,09%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi							80.000.000	100.000.000				#######						40,68%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota							90.000.000	120.000.000				#######						48,08%
	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan							95.000.000	125.000.000				#######						51,57%
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi												#######						46,67%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	dan Akuntabilitas Kinerja							540.705.855	655.000.000				#						
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							95.000.000	125.000.000				########						39,65%
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja							90.000.000	110.000.000				########						39,71%
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja							90.000.000	110.000.000				########						35,07%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan							50.000.000	60.000.000				########						34,35%
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik							215.705.855	250.000.000				########						60,36%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							1.679.779.466	1.795.619.600				########						213,82%
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan							241.066.000	213.034.800				########						74,26%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan							146.270.000	160.897.000				########						92,94%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum							47.398.000	52.137.800				-						
	Fasilitasi Penataan Wilayah							47.398.000	-				########						90,89%
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah							1.040.508.000	1.144.558.800				########						127,05%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD							381.456.000	419.601.600				########						57,16%
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan							160.418.000	176.459.800				########						522,64%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan							498.634.000	548.497.400				########						53,25%
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah							398.205.466	438.026.000				########						525,04%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah							398.205.466	438.026.000				########						525,04%
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta							-	-				-						0,00%
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama							-	-				-						0,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							##########	38.422.982.875				#######						79,22%
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual							##########	13.363.394.000				#######						6,88%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual							##########	11.332.491.500				-						0,00%
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual							1.846.275.000	2.030.902.500				#######						45,25%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar							########### ##	24.059.588.875				######## #						122,26%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan							296.406.250	326.046.875				########						79,17%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan							4.127.355.490	4.500.000.000				########						0,47%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial							########### ##	19.233.542.000				######## #						151,80%
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar							875.000.000	1.000.000.000				######## #						7,73%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata							250.000.000	300.000.000				########						11,06%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja							375.000.000	400.000.000				-						0,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan							250.000.000	300.000.000				########						16,00%
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM							825.589.260	908.148.180				########						111,65%
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan							580.000.000	638.000.000				########						128,70%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan							400.000.000	440.000.000				########						109,99%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan												########						
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya							60.000.000	66.000.000				########						8,22%
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota							120.000.000	132.000.000				########						76,01%
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum							245.589.260	270.148.180				########						71,40%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum							180.500.000	198.550.000				########						70,83%
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM							65.089.260	71.598.180				########						72,98%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							323.403.576	410.000.000				########						38,06%
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian							133.403.576	160.000.000				########						22,39%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro							93.403.576	110.000.000				########						20,49%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi MIkro							40.000.000	50.000.000				########						26,82%
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam							120.000.000	150.000.000				########						57,95%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan							30.000.000	40.000.000				########						33,25%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup							30.000.000	40.000.000				########						95,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air							60.000.000	70.000.000				########						51,77%
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD							70.000.000	100.000.000				########						33,81%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha							50.000.000	70.000.000				########						47,34%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah							20.000.000	30.000.000				-						0,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							2.750.935.525	3.070.000.000				########						42,61%
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							1.535.440.000	1.740.000.000				########						29,03%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa							100.000.000	120.000.000				-						0,00%
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa							1.335.440.000	1.500.000.000				########						33,38%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa							100.000.000	120.000.000				-						0,00%
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							1.037.960.846	1.140.000.000				########						66,59%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik							937.960.846	1.000.000.000				########						73,69%
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa							50.000.000	70.000.000				-						0,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa							50.000.000	70.000.000				-						0,00%
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							177.534.679	190.000.000				########						19,88%
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa							65.534.679	70.000.000				########						28,65%
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa							56.000.000	60.000.000				########						29,49%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa							56.000.000	60.000.000				-						0,00%
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							270.000.000	290.000.000				########						31,60%
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah							150.000.000	160.000.000				########						39,51%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																		
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																		
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah							150.000.000	160.000.000				########						39,51%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah							120.000.000	130.000.000				########						21,72%
	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah							120.000.000	130.000.000				########						21,72%
	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																		

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretaris Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	**48.394.471.715**	**50.942.622.648**	**53.489.753.780**			**44.857.635.463**	**48.258.596.839**	**38.020.661.672**			**92,69%**	**94,73%**	**71,08%**				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pelayanan Administrasi Perkantoran	25.427.230.605	26.765.505.900	28.103.781.195			27.231.925.246	25.543.271.314	20.229.822.532			107,10 %	95,43%	71,98%				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.575.761.110	19.553.432.748	20.531.104.385			14.122.244.847	20.413.800.617	15.676.124.408			76,03%	104,40 %	76,35%				
Peningkatan Disiplin Aparatur	982.720.000	1.031.856.000	1.083.448.800			998.064.000	350.500.000	81.337.500			101,56 %	33,97%	7,51%				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	559.400.000	600.000.000	630.000.000														
Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	2.849.360.000	2.991.828.000	3.141.419.400			2.505.401.370	1.951.024.908	2.033.377.232			87,93%	65,21%	64,73%				
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	**818.556.850**	**1.306.000.000**	**1.366.000.000**			**385.876.240**	**1.467.475.409**	**58.370.721**			**47,14%**	**112,36 %**	**4,27%**				
Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0														

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Monitoring pengawasan supplay dan demand barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	101.000.000	101.000.000														
Monitoring dan Evaluasi Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000	100.000.000	125.000.000				37.160.000	2.625.000				37,16%	2,10%				
Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka belitung	198.500.000	310.000.000	320.000.000			112.151.410	46.036.788	13.563.098			56,50%	14,85%	4,24%				
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	125.000.000	130.000.000				31.795.200	2.625.000				25,44%	2,02%				
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0														

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Monitoring dan Evaluasi pengembangan industri hilir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0														
Monitoring,Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	117.856.050	220.000.000	230.000.000			80.128.920	74.579.800	2.625.000			67,99%	33,90%	1,14%				
Monitoring dan Evaluasi Analisis Ekonomi Makro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	117.100.800	140.000.000	140.000.000			62.321.600	1.198.550.703	5.125.000			53,22%	856,11%	3,66%				
Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	166.000.000	100.000.000	100.000.000			65.843.612	34.363.300				39,66%	34,36%					
Forum Pengembangan Ekonomi	119.100.000	210.000.000	220.000.000			65.430.698	44.989.618	3.125.000			54,94%	21,42%	1,42%				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			2.625.000					2.625.000					100,00 %				
Kegiatan Kerjasama IMT-GT Regional Sumatera dan Sekretariat IMT-GT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			26.664.810					23.432.623					87,88%				
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Berkah Mart di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			2.625.000					2.625.000					100,00 %				
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	**644.924.775**	**882.500.000**	**916.625.000**			**165.307.296**	**6.437.300**	**7.875.000**			**25,63%**	**0,73%**	**0,86%**				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Penggunaan Subsidi listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0														
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	153.324.000	162.500.000	162.500.000			87.750.221	1.600.000	2.625.000			57,23%	0,98%	1,62%				
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan serta Pengembangan Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000	100.000.000	100.125.000				1.512.500	2.625.000				1,51%	2,62%				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Monitoring dan evaluasi Perizinan Analisis mengenai Dampak LIngkungan (Amdal) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50.000.000	70.000.000	104.000.000				1.812.400					2,59%					
Kajian Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Fungsi Balai Benih Pertanian, Kelautan dan Perikanan	0	0	0														
Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Komoditi Pangan	137.765.700	150.000.000	150.000.000			77.557.075	1.512.400	2.625.000			56,30%	1,01%	1,75%				
Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan di PRovinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0														

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Monitoring dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan masalah Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	203.835.075	400.000.000	400.000.000														
Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi komoditi lada di Prov.Kep.Babel	0	0	0														
Koordinasi Pemerataan dan percepatan penggunaan energi alternatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0														
Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	**2.350.877.200**	**3.260.000.000**	**2.200.000.000**			**481.432.826**	**399.309.341**	**37.875.000**			**20,48%**	**12,25%**	**1,72%**				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kajian potensi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0														
Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	762.011.400	1.500.000.000	200.000.000			267.932.428	26.528.600				35,16%	1,77%					
Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	117.100.800	150.000.000	200.000.000			61.594.482	149.716.960	2.625.000			52,60%	99,81%	1,31%				
Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000	120.000.000	220.000.000			40.645.741	1.000.000	32.625.000			40,65%	0,83%	14,83%				
Penyusunan Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	300.000.000	320.000.000	340.000.000														

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kajian dan Penyusunan Perlindungan Benda Cagar Budaya atau Benda diduga cagar budaya	300.000.000	320.000.000	340.000.000				138.535.993				0,00%	43,29%					
Kajian Strategis Destinasi Wisata Baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000	120.000.000	140.000.000			57.730.235					57,73%						
Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	99.100.000	150.000.000	160.000.000			53.529.940	83.527.788				54,02%	55,69%					
Penyusunan SOP BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	349.845.000	350.000.000	360.000.000														
Pemetaan Potensi Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	222.820.000	230.000.000	240.000.000														

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Kegiatan Pengembangan Kemitraan BUMD			3.750.000,00					2.625.000					70,00%				
Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	**475.514.731**	**1.407.072.623**	**1.208.633.140**			**303.465.842**	**41.326.524**				**63,82%**	**2,94%**					
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem e-Monep APBN	257.308.000	436.643.000	429.852.588			173.158.600	23.736.524				67,30%	5,44%					
Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBN	161.256.731	243.864.764	280.444.479			99.698.458	17.590.000				61,83%	7,21%					
Koordinasi Kebijakan APBN	56.950.000	161.200.000	185.380.000			30.608.784					53,75%						
Penyusunan Pergub / Revisi Pergub tentang Pengendalian Dana APBN	0	150.000.000	0														
Penyusunan Kebijakan Implementasi Jaringan Aplikasi E-Monep APBN	0	165.000.000	0														

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pemuthahiran Aplikasi E-Monep APBN	0	0	0														
Penggunaan Aplikasi E-Monep APBN	0	250.364.859	312.956.073														
Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	**5.385.583.757**	**700.574.000**	**5.735.910.000**			**279.036.511**	**1.677.192.804**	**73.572.800**			**5,18%**	**239,40 %**	**1,28%**				
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Sengketa Pertanahan di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	81.300.000	85.300.000														
Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	108.400.000	118.345.000	124.260.000			107.444.000	511.024.920	19.493.400			99,12%	431,81 %	15,69%				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59.244.500	108.129.000	113.500.000			38.275.950					64,61%						
Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan, Dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan)	124.370.500	157.000.000	165.300.000			96.380.086					77,49%						
Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas daerah	48.806.282	105.000.000	110.250.000			36.596.475					74,98%						
Kegiatan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung	94.762.475	130.800.000	137.300.000			340.000					0,36%						
Pengadaan Lahan	4.950.000.000	0	5.000.000.000														

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Internal Biro Pemerintahan.		824.106.725					817.076.004					99,15%					
Pembinaan Penanganan Masalah Konflik Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitug.		104.100.000					87.167.560					83,73%					
Penyusunan Sistem Informasi Data Administrasi Kewilayahan.		44.440.000	11.095.400				4.745.000	11.095.400				10,68%	100,00 %				
Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi.		23.918.000					9.620.000					40,22%					
Penegasan Batas Daerah.		313.159.000	43.668.000				247.559.320	42.984.000				79,05%	98,43%				
Program Pengembangan Otonomi Daerah	**1.448.652.830**	**2.638.074.000**	**2.772.705.000**			**1.413.000.098**	**741.778.578**	**890.469.627**			**97,54%**	**28,12%**	**32,12%**				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	165.953.745	327.905.000	347.905.000			140.541.200	119.637.500	448.816.613			84,69%	36,49%	129,01 %				
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017	351.810.000	367.500.000	386.500.000			366.541.760	223.520.935				104,19 %	60,82%					
Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	276.971.408	467.000.000	490.000.000			270.029.102	157.824.339				97,49%	33,80%					
Kegiatan Desk Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	143.257.000	262.500.000	275.100.000			139.929.889					97,68%						

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Kegiatan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan KDH dan WKDH	116.415.704	210.000.000	220.000.000			108.585.850					93,27%						
Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota	0	157.000.000	165.375.000														
Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri	74.753.565	157.000.000	165.375.000			71.195.000	25.945.683	95.046.790			95,24%	16,53%	57,47%				
Rapat koordinasi optimalisasi penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan Otonomi Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung	116.015.704	229.587.000	241.100.000			115.537.239					99,59%						

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Rapat koordinasi penerapan pelaksanaan NSPK di Prov. Kep. Bangka Belitung	101.165.704	229.582.000	241.100.000			99.056.702					97,92%						
Kegiatan perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan internal Biro Pemerintahan	0	105.000.000	110.250.000														
Workshop Penataan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	102.310.000	125.000.000	130.000.000			101.583.356					99,29%						
Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		77.200.000					46.501.900					60,24%					

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Legislative dan Pilpres 2019.		6.200.000					6.200.000					100,00 %					
Verifikasi Berkas Calon Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		88.860.000					84.552.140					95,15%					
Optimalisasi Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		78.940.000					77.596.081					98,30%					
Kegiatan administrasi penatausahaan biro pemerintahan			350.238.666				346.606.224						0,00%				
Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	**1.639.284.704**	**1.665.551.000**	**1.726.311.000**			**1.470.581.335**	**666.498.578**	**1.713.010.579**			**89,71%**	**40,02%**	**99,23%**				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	220.949.000	382.389.000	401.508.000			108.146.940	328.603.278	278.174.076			48,95%	85,93%	69,28%				
Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	101.320.000	230.464.000	241.980.000			115.197.110	90.825.000	94.450.000			113,70 %	39,41%	39,03%				
Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	137.765.704	260.284.000	273.290.000			150.000.000	150.260.000				108,88 %	57,73%					
Kegiatan Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD	0	78.629.000	82.560.000				13.545.000	1.860.000				17,23%	2,25%				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Kegiatan Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	197.400.000	144.411.000	151.631.000			196.445.495	55.369.300	1.338.526.503			99,52%	38,34%	882,75 %				
Kegiatan Inventarisasi potensi kerjasama	93.150.000	119.374.000	125.342.000			90.986.722	11.558.500				97,68%	9,68%					
Kegiatan Penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat	888.700.000	450.000.000	450.000.000			809.805.068	16.337.500				91,12%	3,63%					
Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	**8.394.550.000**	**12.728.933.000**	**11.595.068.000**			**7.429.257.519**	**8.717.697.220**	**1.165.206.927**			**88,50%**	**68,49%**	**10,05%**				
Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung	1.335.332.000	1.502.648.000	1.552.648.000			1.311.814.146	1.910.470.871	466.400.998			98,24%	127,14 %	30,04%				
Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan	616.530.000	675.100.000	725.100.000			524.025.500	470.454.000	463.984.000			85,00%	69,69%	63,99%				
Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	903.270.000	998.600.000	1.048.600.000			703.356.171	545.075.000	142.383.329			77,87%	54,58%	13,58%				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung	488.088.000	554.080.000	604.080.000			477.761.010	468.950.000	86.063.600			97,88%	84,64%	14,25%				
Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji	3.170.920.000	3.250.000.000	3.300.000.000			2.912.188.990	3.354.413.792	6.375.000			91,84%	103,21 %	0,19%				
Persiapan Musabaqah Hafidz Qur'an Internasional	500.000.000	2.372.040.000	2.422.040.000			345.107.266					69,02%						
Pembinaan dan Pemberangkatan Khafilah STQ Nasional	1.380.410.000	1.506.600.000	1.556.600.000			1.155.004.436	763.188.457				83,67%	50,66%					
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	0	336.000.000	386.000.000														
Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah Prov. Kep. Babel	0	534.965.000	0				398.516.000					74,49%					
Pembinaan dan Pemberangkatan Kontingen POSPENAS	0	998.900.000	0				806.629.100					80,75%					

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata	**1.323.400.000**	**2.010.920.000**	**2.160.920.000**			**969.398.600**	**791.989.000**	**315.246.000**			**73,25%**	**39,38%**	**14,59%**				
Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	297.820.000	384.090.000	434.090.000			220.120.500	112.335.200				73,91%	29,25%					
Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.025.580.000	1.096.630.000	1.146.630.000			749.278.100	679.653.800	315.246.000			73,06%	61,98%	27,49%				
Koordinasi Bidang Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata	0	530.200.000	580.200.000														
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	**535.189.000**	**1.067.422.000**	**1.217.422.000**			**317.196.650**	**78.461.400**	**206.104.700**			**59,27%**	**7,35%**	**16,93%**				
Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	0	430.233.000	480.233.000				58.346.400					13,56%					

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah	333.985.000	383.985.000	433.985.000			188.585.600	9.125.000	110.215.000			56,47%	2,38%	25,40%				
Evaluasi dan Analisi Proposal Bansos dan Hibah	201.204.000	253.204.000	303.204.000			128.611.050	10.990.000	95.889.700			63,92%	4,34%	31,63%				
Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	**1.912.323.600**	**3.420.000.000**	**3.710.000.000**			**1.711.488.044**	**206.849.700**	**817.953.834**			**89,50%**	**6,05%**	**22,05%**				
Penyusunan Propemperda Dan Rancangan Peraturan Daerah	959.843.600	1.500.000.000	1.550.000.000			896.008.774	83.325.000	415.140.934			93,35%	5,56%	26,78%				
Penyusunan Produk Hukum Daerah	567.480.000	500.000.000	600.000.000			526.255.384	118.623.500	230.727.682			92,74%	23,72%	38,45%				
Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	67.220.000	150.000.000	170.000.000			65.753.457	600.000	24.509.100			97,82%	0,40%	14,42%				
Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	0	420.000.000	440.000.000					73.414.364					16,69%				
Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	317.780.000	400.000.000	430.000.000			223.470.429	4.301.200	74.161.754			70,32%	1,08%	17,25%				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	0	160.000.000	180.000.000														
Rapat Koordinasi Program Pembentukan Peraturan Daerah	0	140.000.000	170.000.000														
Bimbingan Teknis Legal Drafting	0	150.000.000	170.000.000														
Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	**955.806.626**	**1.816.000.000**	**1.970.046.250**			**728.136.127**	**189.585.700**	**192.965.950**			**76,18%**	**10,44%**	**9,79%**				
Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi	170.370.000	300.000.000	320.000.000			126.469.039	19.660.000	44.033.600			74,23%	6,55%	13,76%				
Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	191.528.000	300.000.000	320.000.000			125.137.088	84.693.700	72.147.800			65,34%	28,23%	22,55%				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	93.865.626	150.000.000	170.000.000			85.266.600	4.609.000	17.709.500			90,84%	3,07%	10,42%				
Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	94.444.000	210.000.000	240.000.000			86.619.800	5.490.000	17.475.050			91,72%	2,61%	7,28%				
Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	156.966.000	230.000.000	260.000.000			106.676.700	75.133.000	41.600.000			67,96%	32,67%	16,00%				
Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten/Kota	248.633.000	350.000.000	370.000.000			197.966.900					79,62%						

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyuluhan HAM	0	136.000.000	140.046.250														
Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemerintah Daerah	0	140.000.000	150.000.000														
Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	**750.391.500**	**1.510.000.000**	**1.670.000.000**			**467.324.563**	**1.277.898.260**	**20.890.800**			**62,28%**	**84,63%**	**1,25%**				
Pengelolaan dan Pengembangan JDIH	482.138.000	600.000.000	650.000.000			364.166.560	1.277.898.260	3.000.000			75,53%	212,98%	0,46%				
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum	61.658.000	85.000.000	90.000.000			35.978.890					58,35%						
Penyusunan Katalog Perda dan Pergub dan Kompilasi Perda dan Pergub	69.125.500	85.000.000	90.000.000			67.179.113					97,18%						
Penyusunan Abstar Produk Hukum Daerah	0	120.000.000	140.000.000														

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyusunan Arsip Produk Hukum Daerah	0	85.000.000	90.000.000														
Pembinaan Pelaksanaan JDIH Kabupaten/Kota	0	0	0														
Sosialisasi Perda	0	95.000.000	110.000.000														
Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	137.470.000	170.000.000	190.000.000			120.967.425	39.049.700	17.890.800			88,00%	22,97%	9,42%				
Publikasi Produk Hukum Daerah di Media	0	0	0														
Bimtek Sistem Informasi Hukum	0	140.000.000	160.000.000														
Rakor JDIH Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	130.000.000	150.000.000														
Program Perencanaan Setda	**301.467.968**	**428.313.000**	**492.559.950**			**160.507.629**	**49.724.600**	**46.765.600**			**53,24%**	**11,61%**	**9,49%**				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	149.599.950	202.610.000	233.001.500			70.064.930	23.345.350	23.416.550			46,83%	11,52%	10,05%				
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah	151.868.018	225.703.000	259.558.450			90.442.699	26.379.250	23.349.050			59,55%	11,69%	9,00%				
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	**779.993.020**	**1.549.651.606**	**1.780.849.347**			**604.834.881**	**744.141.427**				**77,54%**	**48,02%**					
Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	108.080.000	380.450.000	437.517.500			79.192.073	744.141.427				73,27%	195,60 %					
Peningkatan Fungsi Sistem Monitoring TEPRA (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota	578.951.855	662.436.606	761.802.097			381.482.888					65,89%						

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Peningkatan Pengendalian Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	92.961.165	331.765.000	381.529.750			56.795.500					61,10%						
Koordinasi Penetapan Target Fisik dan Keuangan APBD Provinsi	0	175.000.000	200.000.000			87.364.420											
Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd	**501.326.670**	**1.982.884.194**	**1.959.232.094**			**134.477.490**	**121.879.500**				**26,82%**	**6,15%**					
Peningkatan Fungsi Sistem E-Monep APBD	0	602.328.194	627.328.194				26.202.000					4,35%					
Koordinasi Penyempurnaan Aplikasi e-Monep APBD	398.674.000	538.326.000	619.074.900			94.091.990					23,60%						
Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	102.652.670	152.650.000	175.547.500			40.385.500					39,34%						
Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Jaringan Aplikasi e-Monev berkelanjutan	0	0	250.000.000														

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penggunaan Aplikasi E-Monep APBD	0	0	0														
Peningkatan Capaian Realisasi APBD	0	225.620.000	0				76.175.000					33,76%					
Peningkatan Fungsi Sismontepra APBD Provinsi, Kab/Kota	0	463.960.000	287.281.500				19.502.500					4,20%					
Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	**554.899.000**	**1.446.989.500**	**1.591.688.450**			**323.373.394**	**889.597.497**	**82.250.300**			**58,28%**	**61,48%**	**5,17%**				
Peningkatan penerapan data dan informasi layanan	211.370.000	533.841.000	587.225.100			119.594.454	8.100.000				56,58%	1,52%					
Pengelolaan data dan informasi	125.128.000	259.050.000	284.955.000			46.860.950	13.665.200	18.247.200			37,45%	5,28%	6,40%				
Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	112.637.000	411.235.000	452.358.500			71.708.770	28.437.600	44.501.100			63,66%	6,92%	9,84%				
Peningkatan Pelayanan Publik	105.764.000	242.863.500	267.149.850			85.209.220	13.665.200	19.502.000			80,57%	5,63%	7,30%				
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	**2.337.898.000**	**5.034.568.000**	**5.538.024.800**			**1.806.991.211**	**1.030.944.311**	**927.437.874**			**77,29%**	**20,48%**	**16,75%**				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP	1.927.350.000	3.540.240.000	3.894.264.000			1.602.033.069	891.787.698	927.437.874			83,12%	25,19%	23,82%				
Peningkatan Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa	183.145.000	495.429.000	544.971.900			98.654.959	66.150.094				53,87%	13,35%					
Peningkatan pelayanan perencanaan Pengadaan barang dan jasa	111.378.000	404.888.000	445.376.800			45.669.800					41,00%						
Pencegahan dan Penanganan Pengaduan	116.025.000	594.011.000	653.412.100			60.633.383	73.006.519				52,26%	12,29%					
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	**2.539.128.000**	**5.020.020.500**	**5.522.022.550**			**1.814.816.030**	**1.653.776.602**	**605.590.734**			**71,47%**	**32,94%**	**10,97%**				
Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.195.925.000	2.116.136.000	2.327.749.600			1.058.917.331	952.296.951	476.654.850			88,54%	45,00%	20,48%				
Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	459.493.000	962.824.500	1.059.106.950			256.749.433	138.556.488				55,88%	14,39%					
Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	308.280.000	781.825.000	860.007.500			94.816.455	98.134.063				30,76%	12,55%					

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	575.430.000	1.159.235.000	1.275.158.500			404.332.811	464.789.100	128.935.884			70,27%	40,09%	10,11%				
Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisisi Jabatan	**2.047.186.525**	**952.670.000**	**1.067.670.000**			**388.834.028**	**244.708.431**	**245.772.197**			**18,99%**	**25,69%**	**23,02%**				
Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	81.146.000	132.670.000	142.670.000			51.978.830					64,06%						
Evaluasi Kelembagaan UPTD/Cabdin Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		14.070.000,00					13.155.000					93,50%					
Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Beliltung		37.114.500,00					32.553.478	29.946.911				87,71%					

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			46.078.080					45.600.748					98,96%				
Pembinaan uraian tugas perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	133.810.000																
Pembinaan kelembagaan UPTD/UPTB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	74.827.500	160.000.000	180.000.000			49.076.700					65,59%						
Sinkronisasi fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	87.240.000																

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016	170.000.000																
Pembinaan kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	83.475.000	150.000.000	175.000.000			11.582.000	1.510.000	51.632.400			13,87%	1,01%	29,50%				
penyusunan profil aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	89.765.000																
Evaluasi jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	74.751.945	160.000.000	170.000.000			72.772.468					97,35%						

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Bimbingan teknis penyusunan standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	243.553.000																
Penyusunan standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	113.207.580	130.000.000	170.000.000			81.816.000					72,27%						
Validasi Analisis Beban Kerja Jabatan Aparatur Sipil negara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	201.805.000						102.284.885	82.900.138									

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Validasi Standar Kopetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		59.950.000,00					48.740.239					81,30%					
Validasi dan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	233.510.000						46.464.829	35.692.000									
Pembinaan dan analisa jabatan dan beban kerja	195.087.500	220.000.000	230.000.000			121.608.030					62,34%						
Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional tertentu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	265.008.000																
Program Peningkatan Dan Pengembangan											**13,10%**	**4,65%**	**6,07%**				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Kinerja Pemerintah Daerah	**2.868.168.893**	**4.115.000.000**	**3.922.000.000**			**375.650.482**	**191.195.562**	**238.172.418**									
Penyusunan Profil Aparatur jabatan struktural	115.000.000	145.000.000	165.000.000														
Forum Sekretaris Daerah Prov.babel	50.241.497	175.000.000	185.000.000			29.347.500	10.294.350				58,41%	5,88%					
Pembinaan dan Evaluasi Profil Aparatur UPT Pemprov Babel	33.615.875	145.000.000	175.000.000			22.764.000					67,72%						
Pengadaan aplikasi e-Sakip/penerapan aplikasi e-Sakip	150.000.000	175.000.000	175.000.000														
Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67.424.000	215.000.000	225.000.000			46.092.540	72.981.919				68,36%	33,95%					

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pembinaan laporan kinerja	175.000.000	200.000.000	225.000.000														
Bimbingan teknis E-LHKPN	106.301.000	165.000.000	187.000.000			87.578.650					82,39%						
Pembangunan zona integritas	125.000.000	150.000.000	175.000.000														
Rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah	127.570.000	200.000.000	220.000.000			80.799.330					63,34%						
Bimbingan teknis pengisian LHKPN	112.500.000	175.000.000	180.000.000														
Penyusunan laporan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75.331.000	175.000.000	225.000.000			62.002.677	19.965.000				82,31%	11,41%					
Penyusunan pedoman indikator kinerja utama	225.000.000	250.000.000	0														
Penyusunan Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja ASN	250.000.000	270.000.000	275.000.000														

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Rakor pencapaian indikator kinerja utama	125.000.000	150.000.000	175.000.000														
Penyusunan database capaian kinerja individu	225.000.000	250.000.000	0														
Penyusunan standar capaian kinerja individu ASN	250.000.000	270.000.000	275.000.000				20.448.200					7,57%					
Penyusunan standar reward capaian kinerja individu dan perangkat daerah	250.000.000	270.000.000	275.000.000														
Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	63.309.781	270.000.000	275.000.000				66.116.593	24.382.400				24,49%	8,87%				
Forum Staf Ahli Kepala Daerah	175.000.000	185.000.000	195.000.000														
Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	72.140.240	120.000.000	140.000.000			47.065.785	1.389.500				65,24%	1,16%					

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Bimbingan teknis penyusunan capaian kinerja individu ASN di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	94.735.500	160.000.000	175.000.000														
Manajemen Perubahan			98.178.800					97.137.538					98,94%				
Penigkatan Akuntabilitas Kinerja			59.060.050					56.564.052					95,77%				
Data dan Informasi Kinerja			61.019.237					60.088.428					98,47%				
Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	**852.840.935**	**1.900.000.000**	**2.035.000.000**			**499.237.123**	**1.214.630.908**	**307.169.845**			**58,54%**	**63,93%**	**15,09%**				
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	85.119.480	170.000.000	190.000.000			66.988.810	134.466.370	10.755.798			78,70%	79,10%	5,66%				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48.999.680	150.000.000	200.000.000			28.105.100	750.000	89.936.261			57,36%	0,50%	44,97%				
Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	88.991.825	170.000.000	190.000.000			61.050.090	18.474.390				68,60%	10,87%					
Peningkatan administrasi ketatausahaan	72.493.150	285.000.000	300.000.000				881.499.851	149.557.804				309,30 %	49,85%				
Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	97.924.275	300.000.000	300.000.000			79.743.279	43.929.889	20.963.555			81,43%	14,64%	6,99%				
Audit Surveillance ISO 9001:2008 menuju Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Samsat Sungailiat dan UPTSP	149.319.550	200.000.000	200.000.000														

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Peningkatan Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.324.275	200.000.000	200.000.000			77.883.764	115.650.408				77,63%	57,83%					
Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	123.155.325	275.000.000	290.000.000			77.026.700	18.960.000				62,54%	6,89%					
Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	86.513.375	150.000.000	165.000.000			57.779.900	900.000	35.956.427			66,79%	0,60%	21,79%				
Penyelenggaraan standar pelayanan minimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59.354.750,00					50.659.480					85,35%						
Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	**2.193.142.400**	**3.503.023.340**	**4.020.448.841**			**1.878.528.389**	**1.366.525.000**	167.550.000			**85,65%**	**39,01%**	**4,17%**				
Publikasi Media Massa / Cetak	1.467.700.000	2.242.500.000	2.578.875.000			1.409.825.139	796.375.000	117.765.000			96,06%	35,51%	4,57%				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Publikasi Media Elektronik/IT	299.942.025	458.425.765	527.189.630			184.990.000	312.500.000	40.875.000			61,68%	68,17%	7,75%				
Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho	163.901.900	260.899.580	300.034.517			123.760.750	153.975.000	8.910.000			75,51%	59,02%	2,97%				
Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah Provinsi	241.827.425	378.407.385	435.168.492			159.952.500	103.675.000	-			66,14%	27,40%					
Media Gathering	0	52.195.000	60.024.250														
Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT	19.771.050	30.315.610	34.862.952			11.031.000					55,79%						
Workshop Bidang Kehumasan	0	80.280.000	84.294.000														
Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	**162.698.250**	**535.354.305**	**585.657.450**			**48.870.000**	**180.074.100**	**87.514.147**			**30,04%**	**33,64%**	**14,94%**				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.562.500	78.846.875	90.673.906			48.870.000	79.070.000	9.957.500			73,42%	100,28 %	10,98%				
Workshop Bidang Keprotokolan	96.135.750	221.802.225	225.072.558				101.004.100					45,54%					
Layanan Tamu Pemerintah dan Negara	0	84.705.205	97.410.986														

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Peningkatan Fungsi Keprotokolan	0	150.000.000	172.500.000					77.556.647					44,96%				
Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	**1.224.371.325**	**1.975.838.255**	**2.272.213.993**			**1.059.488.769**	**1.339.360.061**	169.492.761			**86,53%**	**67,79%**	**7,46%**				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	183.992.200	285.174.930	327.951.170			171.205.000	188.133.500	14.602.500			93,05%	65,97%	4,45%				
Pengumpulan, Penyaringan informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah di rubah menjadi Pengumpulan Informasi, Layanan Kehumasan, dan keprotokolan	259.830.650	396.076.330	455.487.780			156.625.159	527.920.661	53.825.170			60,28%	133,29 %	11,82%				
Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	230.918.550	362.861.110	417.290.276			144.718.910	19.347.400	20.998.710			62,67%	5,33%	5,03%				

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan	533.821.375	792.152.775	910.975.691			578.155.000	603.958.500	74.775.700			108,30 %	76,24%	8,21%				
Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan	15.808.550	39.573.110	45.509.076			8.784.700		5.290.681			55,57%		11,63%				
Penyediaan Pakaian Khusus Lapangan Humas dan Protokol	0	100.000.000	115.000.000														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				185.000.000	203.500.000				63.490.928						34,32%		
				94.526.392.988	105.163.351.821				77.283.954.741						81,76%		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				185.000.000	203.500.000				63.490.928						34,32%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				166.000.000	180.000.000				39.408.978						23,74%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.000.000	23.500.000				24.081.950						126,75%		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				49.274.795.830	54.202.275.413				40.866.869.962						82,94%		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				49.274.795.830	54.202.275.413				40.866.869.962						82,94%		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																	
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				200.000.000	200.000.000				146.107.512						73,05%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				200.000.000	200.000.000				146.107.512						73,05%		
Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																	
Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																	

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																	
Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																	
Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah																	
Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah																	
Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				310.000.000	341.000.000				-						0,00%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				160.000.000	176.000.000				-						0,00%		
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun																	

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																	
Sub Kegiatan Pemindahan Tugas ASN																	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150.000.000	165.000.000				-						0,00%		
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				11.416.746.458	13.820.311.405				9.542.889.789						83,59%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				788.511.638	867.362.800				169.487.500						21,49%		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000	82.500.000				19.825.000						26,43%		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000	82.500.000				-						0,00%		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				65.096.000	71.575.900				65.065.000						99,95%		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				357.378.980	393.116.880				244.992.300						68,55%		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				169.953.000	186.948.300				55.062.000						32,40%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material				400.000.000	410.000.000				334.121.300						83,53%		
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.052.800.000	6.850.000.000				5.733.560.370						113,47%		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.433.006.840	4.876.307.525				2.920.776.319						65,89%		
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.500.000.000	2.800.000.000				1.959.769.500						78,39%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.800.000.000	2.000.000.000				1.344.816.000						74,71%		
Pengadaan Alat Besar																	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																	
Pengadaan Mebel																	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				700.000.000	800.000.000				614.953.500						87,85%		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.194.233.900	14.613.157.290				11.787.586.122						89,34%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.941.500.000	5.435.650.000				21.958.661						0,44%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.441.000.000	4.885.100.000				2.935.307.372						66,10%		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.575.200.000	1.832.220.000				1.130.820.089						71,79%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.236.533.900	2.460.187.290				7.699.500.000						344,26%		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.418.925.860	13.660.818.446				7.744.032.868						62,36%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3.280.173.150	3.608.190.465				683.412.084						20,83%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.188.164.150	2.406.980.565				1.335.087.800						61,01%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel				150.000.000	165.000.000				42.922.000						28,61%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.883.800.000	2.072.180.000				338.301.800						17,96%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.254.616.260	4.680.077.886				4.417.272.584						103,82%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				662.172.300	728.389.530				927.036.600						140,00%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																	

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.642.246.217	1.780.000.000				1.554.161.962						94,64%		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				245.046.217	265.000.000				240.535.630						98,16%		
Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				82.200.000	90.000.000				22.000.000						26,76%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				65.000.000	75.000.000				41.626.332						64,04%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.250.000.000	1.350.000.000				1.250.000.000						100,00%		
Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				2.051.800.723	2.100.000.000				1.657.233.000						80,77%		
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				583.709.644	600.000.000				825.310.000						141,39%		
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				278.137.296	300.000.000				569.448.000						204,74%		
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				1.189.953.783	1.200.000.000				262.475.000						22,06%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				72.850.000	80.000.000				1.204.188.179						1652,97%		
Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan				72.850.000	80.000.000				1.204.188.179						1652,97%		
Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																	
Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan				1.444.794.000	1.565.789.267				821.115.847						56,83%		
Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				945.744.000	1.000.000.000				23.453.928						2,48%		
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				499.050.000	565.789.267				797.661.919						159,84%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				805.705.855	1.000.000.000				377.137.423						46,81%		
Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				265.000.000	345.000.000				124.798.167						47,09%		
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				80.000.000	100.000.000				32.540.501						40,68%		
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				90.000.000	120.000.000				43.268.585						48,08%		
Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan				95.000.000	125.000.000				48.989.081						51,57%		
Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan															46,67%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Akuntabilitas Kinerja				540.705.855	655.000.000				252.339.256								
Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				95.000.000	125.000.000				37.664.000						39,65%		
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				90.000.000	110.000.000				35.736.426						39,71%		
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				90.000.000	110.000.000				31.566.541						35,07%		
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				50.000.000	60.000.000				17.175.000						34,35%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				215.705.855	250.000.000				130.197.289						60,36%		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				1.679.779.466	1.795.619.600				3.591.698.046						213,82%		
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				241.066.000	213.034.800				179.023.502						74,26%		
Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				146.270.000	160.897.000				135.945.801						92,94%		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				47.398.000	52.137.800				-								
Fasilitasi Penataan Wilayah				47.398.000	-				43.077.701						90,89%		
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah				1.040.508.000	1.144.558.800				1.321.956.240						127,05%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				381.456.000	419.601.600				218.025.190						57,16%		
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				160.418.000	176.459.800				838.402.824						522,64%		
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				498.634.000	548.497.400				265.528.226						53,25%		
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah				398.205.466	438.026.000				2.090.718.304						525,04%		
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah				398.205.466	438.026.000				2.090.718.304						525,04%		
Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta				-	-				-						0,00%		
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				-	-				-						0,00%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				34.898.071.740	38.422.982.875				27.646.725.548						79,22%		
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				12.148.540.000	13.363.394.000				835.350.848						6,88%		
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				10.302.265.000	11.332.491.500				-						0,00%		
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				1.846.275.000	2.030.902.500				835.350.848						45,25%		
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				21.874.531.740	24.059.588.875				26.743.710.700						122,26%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				296.406.250	326.046.875				234.679.000						79,17%		
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				4.127.355.490	4.500.000.000				19.260.000						0,47%		
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				17.450.770.000	19.233.542.000				26.489.771.700						151,80%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				875.000.000	1.000.000.000				67.664.000						7,73%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				250.000.000	300.000.000				27.661.500						11,06%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				375.000.000	400.000.000				-						0,00%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				250.000.000	300.000.000				40.002.500						16,00%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				825.589.260	908.148.180				921.788.408						111,65%		
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				580.000.000	638.000.000				746.434.564						128,70%		
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				400.000.000	440.000.000				439.956.036						109,99%		
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan									210.331.832								
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				60.000.000	66.000.000				4.934.429						8,22%		
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				120.000.000	132.000.000				91.212.267						76,01%		
Kegiatan Fasilitasi															71,40%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Bantuan Hukum				245.589.260	270.148.180				175.353.844								
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				180.500.000	198.550.000				127.851.029						70,83%		
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				65.089.260	71.598.180				47.502.815						72,98%		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				323.403.576	410.000.000				123.080.860						38,06%		
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				133.403.576	160.000.000				29.871.009						22,39%		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				93.403.576	110.000.000				19.143.005						20,49%		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi MIkro				40.000.000	50.000.000				10.728.004						26,82%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				120.000.000	150.000.000				69.540.161						57,95%		
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				30.000.000	40.000.000				9.975.700						33,25%		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				30.000.000	40.000.000				28.500.000						95,00%		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				60.000.000	70.000.000				31.064.461						51,77%		
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				70.000.000	100.000.000				23.669.690						33,81%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				50.000.000	70.000.000				23.669.690						47,34%		
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																	

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				20.000.000	30.000.000				-						0,00%		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD																	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				2.750.935.525	3.070.000.000				1.172.170.082						42,61%		
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.535.440.000	1.740.000.000				445.709.330						29,03%		
Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				100.000.000	120.000.000				-						0,00%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.335.440.000	1.500.000.000				445.709.330						33,38%		
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				100.000.000	120.000.000				-						0,00%		
Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1.037.960.846	1.140.000.000				691.171.532						66,59%		
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				937.960.846	1.000.000.000				691.171.532						73,69%		
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				50.000.000	70.000.000				-						0,00%		
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				50.000.000	70.000.000				-						0,00%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				177.534.679	190.000.000				35.289.220						19,88%		
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				65.534.679	70.000.000				18.775.680						28,65%		
Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				56.000.000	60.000.000				16.513.540						29,49%		
Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				56.000.000	60.000.000				-						0,00%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				270.000.000	290.000.000				85.327.107						31,60%		
Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				150.000.000	160.000.000				59.259.474						39,51%		
Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																	
Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																	
Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				150.000.000	160.000.000				59.259.474						39,51%		
Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				120.000.000	130.000.000				26.067.633						21,72%		

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				120.000.000	130.000.000				26.067.633						21,72%		
Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	
Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																	

*) diisikan dengan nama Perangkat Daerah

**) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung berorientasi kepada pelayanan selaku unsur penunjang urusan pemerintahan terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berkaitan dengan kegiatan tersebut diatas, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan sekretariat daerah. sebagai berikut :

Tantangan :

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Umum :

1. Semakin meningkatnya tuntutan pelayanan tamu bidang Kerumah tanggaan dan keuangan setda yang optimal.
2. Belum memadai Sarana dan prasarana untuk parkir tamu
3. Mewujudkan pelayanan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPSE)
4. Mewujudkan sinkronisasi SOTK dengan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan mekanisme kerja /prosedur dalam system manajemen Pemerintahan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian capaian kinerja kegiatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mumpuni untuk menopang pertumbuhan perekonomian, serta kebijakan pembiayaan pembangunan strategi
7. Meningkatkan kompetensi ASN

b. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Hukum :

1. Adanya perubahan kebijakan regulasi nasional yang dituangkan dalam Undang-undang cipta kerja tahun 2020 yang mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah secara cepat;
2. Semakin banyaknya tuntutan terkait akses bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
3. Kebjakan Pemerintah Daerah yang belum memenuhi rasa keadilan yang dirasakan masyarakat sehingga menimbulkan sengketa;
4. Semakin meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus berstandar HAM;
5. Adanya kewenangan baru menyangkut fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah sesuai dengan perubahan struktur organisasi.

c. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat :

1. Perlu meningkatkan pelayanan publik bidang kesejahteraan rakyat khususnya dibidang pelayanan dasar dan non pelayanan dasar
2. Belum optimalnya fasilitiasi Pembinaan Mental Spiritual Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Belum maksimalnya penyediaan fasilitasi Sarana dan Prasarana yang optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat khususnya bagi penerima Hibah dan Bantuan Sosial
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi tehnologi digital, sehingga aplikasi yang tersedia belum dapat dimanfaatkan dengan baik

d. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Pengadaan Barang Jasa Barang Jasa :

1. Belum optimalnya proses Pengadaan Barang/Jasa dikarenakan Peraturan tentang Pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum diterapkan maksimal;
2. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang Pengadaan barang/Jasa
3. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk peningkatan level kematangan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Belum Optimalisasi pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan barang dan jasa di lingkungan OPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

e. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Organisasi :

1. Belum optimalnya penerapan penataan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan Peraturan yang mengatur masih menunggu revisi dari Pemerintah Pusat;
2. Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki belum optimal dan kinerja perlu ditingkatkan dalam menjalankan Tugas Poko dan Fungsi yang diemban;
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran yang ada untuk peningkatan pencapaian target dan sasaran Program kegiatan yang telah ditetapkan.

f. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan :

1. Adanya Perubahan Regulasi atau aturan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengendalian pembangunan
2. Kompleksitas isu atau masalah strategis daerah yang memerlukan kajian dan Analisa kebjakan pembangunan daerah
3. Data yang belum terintegritasi dalam pelaksanaan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan
4. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan potensial
5. Rendahnya Produksi Pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan Kelangkaan pasokan Sumber Daya Alam
6. Belum terlaksananya pemetaan teknologi informasi untuk memperkuat kesediaan data informasi di sektor ekonomi
7. Rendahnya kepedulian dan koordinasi antar Perangkat Daerah (Biro) dan atasan dalam penyusunan perencanaan penganggaran

8. Rendahnya kepedulian akan pentingnya pelaporan pengendalian dan evaluasi perencanaan

Peluang :

a. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Umum :

1. Adanya kebijakan dan komitmen Gubernur untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah terutama dalam pelayanan masyarakat
2. Adanya tuntutan Global untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

b. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Hukum :

1. Kemajuan teknologi informasi menyangkut pelayanan fasilitasi hukum Pemerintah Daerah;
2. Adanya peningkatan SDM dibidang hukum melalui penambahan jenis jabatan fungsional terkait pelayanan hukum;
3. Semakin meningkatnya akses pelayanan hukum bagi masyarakat khusunya dibidang peradilan

c. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat :

1. Adanya harapan masyarakat terhadap peran serta Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Terdapatnya Kebijakan yang mendukung kinerja biro dalam mensejahterakan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Terdapatnya tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang jelas
4. Dukungan layanan internal Biro Kesejahteraan Rakyat yang baik pada bidang Perencanaan, Kehumasan, Administrasi Keuangan, Administrasi Barang Milik Daerah/Asset, Administrasi Kepegawaian, dan Administrasi Umum, serta Kelembagaan/Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi

d. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Pengadaan Barang Jasa :

1. Kemajuan teknologi informasi mendukung Transparansi dan Akuntabilitas proses Pengadaan barang dan jasa;
2. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa
3. Adanya transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat mewujudkan pengadaan yang lebih mudah,cepat,transparan dan akuntabel serta adaftif terhadap perubahan regulasi.

e. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Organisasi :

1. Kemajuan teknologi informasi (IPTEK) di era digitalisasi serta di masa pandemi yang sudah berlangsung selama ini mendorong dan memacu movitasi dalam memperlancar pekerjaan akan semakin lebih mudah dan cepat;
2. Adanya Regulasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan Penataan Organisasi yang semakin baik;
3. Telah terjalinnya sinergisitas yang baik antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam penyampaikan berbagai informasi, data dan lain sebagainya mudah,cepat,transparan dan akuntabel serta adaftif terhadap perubahan regulasi.

f. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan :

1. Rekomendasi pengendalian Administraasi pelaksanaan Pembangunan yang di buat
2. Membuat kebijakan dalam Analisa dan pengkajian data pembangunan daerah
3. Rekomendasi evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah dibuat
4. BUMD merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Daerah serta tingginya eksistensi kinerja BLUD
5. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Dukungan stakeholder pusat /daerah dan Mitra perekonomian
7. Ada dukungan dari stakeholder
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

BAB. III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan atas usulan Gubernur. Sekretaris DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang masing-masing dibagi sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Peraturan Gubernur Nomor 68. A Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Permasalahan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun fungsi Sekretariat Daerah dalam kaitannya pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial, perekonomian dan pembangunan serta administrasi sebagai bahan penetapan Gubernur;
2. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum lingkup Sekretariat Daerah;
3. penyelenggaraan kepemimpinan manajemen pada Sekretariat Daerah;
4. penyelenggaraan koordinasi dan pelayanan administratif, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah; dan
5. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
2. Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
3. Penataan Ketataklasanaan;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan;
7. Optimaliasi Pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
8. Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;
9. Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan umum dan

otonomi daerah;

10. Belum optimalnya penataan Capaian Kinerja Penyenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Belum optimalnya evaluasi produk hukum daerah;
12. Belum optimalnya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
13. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
14. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan Kesejahteraan masyarakat daerah;
15. Belum optimalnya penataan permasalahan perekonomian;
16. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
17. Organisasi Perangkat daerah yang menyerahkan LAKIP Tahun 2018-2021 tepat waktu belum mencapai sebesar 90%;
18. Organisasi yang menyusun Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018-2021 tepat waktu belum mencapai sebesar 90%;
19. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP) atas penilaian Ombudsmen;
20. Kurang memadai sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;
21. Belum adanya kesepakatan batas daerah antar Kabupaten/Kota dibeberapa daerah;
22. Melakukan pembinaan terhadap BUMD/Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga diperlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Biro lingkup Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan Biro ditunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

a. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Berdasarkan target capaian program Pemerintah Pusat yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah serta relevan dengan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Program Reformasi Birokrasi dengan sasaran programnya adalah sebagai

berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan
3. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi Ketatalaksanaan
4. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
5. Peningkatan Akuntabilitas
6. Peningkatan kualitas dan optimalisasi
7. Pengendalian Pembangunan
8. Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
9. Peningkatan Kualitas Kinerja BUMD
10. Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi

b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan perumusan dan menetapkan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengkoordinasian administratif, membina, mengawasi, mengendalikan, memimpin pelaksanaan tugas pokok dan koordinasi fungsi Sekretariat Daerah dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas oleh Perangkat Daerah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur senantiasa memperhatikan RTRW, dimana RTWP merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang,rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis provinsi dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi

program pemanfataan ruang terdiri dari program utama,pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan dokumen

perumusan kebijakan umum pembangunan, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Kajian lingkungan hidup strategis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diinternalisasikan dalam kebijakan kawasan lindung 30% dari luas Kepulauan Bangka Belitung.

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mewujudkan perumusan kebijakan umum melaksanakan koordinasipelaksanaan bidang penataan ruang melalui fasilitasi AsistenPerkonomian dan Pembangunan untuk memastikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perwujudan RTRW, mengantisipasi dan menangani permasalahan lingkungan hidup, sebagai bentuk eksistensi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Tantangan penataan ruang akibat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menuntut penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Tugas Sekretariat Daerah dalam merumuskan kebijakan strategis program, kegiatan atau pekerjaan unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti pelaksanaan program pengembangan pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN-provinsi (PKNp), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perlu diwujudkan sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan pelayanan pusat kegiatan yang berupa kawasan perkotaan, akan terus berkembang, termasuk fenomena metropolitan dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang didorong perkembangannya. Pembangunan di kawasan metropolitan dan

pusat pertumbuhan perlu dikelola agar sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Dinamika perubahan kebijakan internal dan eksternal, termasuk perkembangan kawasan perkotaan, menjadi perhatian Sekretariat Daerah dalam peninjauan kembali RTRWP pada periode 5 (lima) tahun ke depan hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur terpilih.

c. Telaah Renstra Kabupaten/Kota

Nilai hasil akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah kabupaten dan Kota di Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel sebagaimana dibawah ini.

Tabel 3.1

Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
			NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT
1	KOTA PANGKALPINANG	100	50,21	CC	51,36	CC	52,92	CC
2	KABUPATEN BANGKA	100	42,06	C	50,54	CC	60,82	B
3	KABUPATEN BANGKA TENGAH	100	46,52	C	48,49	CC	40,62	C
4	KABUPATEN BANGKA BARAT	100	48,92	C	50,02	CC	57,62	CC
5	KABUPATEN BANGKA SELATAN	100	53,37	CC	56,30	CC	60,28	B
6	KABUPATEN BELITUNG	100			53,42	CC	67,16	B
7	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	100			57,25	CC	63,95	B
8	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	100	70.06	BB	80.07	A	81,69	A

Berdasarkan pada data tabel diatas menunjukan bahwa nilai AKIP Kabupaten dan Kota di Kepulauan Bangka Belitung masih terdapat 4 (empat) daerah yang mendapat nilai CC.

1. Predikat A : 2 daerah
2. Predikat B : 19 daerah
3. Predikat BB : 1 daerah
4. Predikat C : 2 daerah
5. Predikat CC :4 daerah

BAB. IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau Provinsi dengan Kabupaten dan Kota, diatur berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah.Tujuan, dan Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Perumusan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program biro-biro.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D), Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan Pegawai ASN pada Perangkat Daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Memperhatikan sasaran pembangunan Pemerintah tahun 2019, prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 serta capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2021 dan target indikator kinerja yang direncanakan pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2023 - 2026, maka rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2023 - 2026 mendukung seluruh sasaran dan prioritas dimaksud serta sebagai upaya pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah maka tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah sesuai Tabel berikut:

Tabel. 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun Ke			
				2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Kebijakan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang ditetapkan	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi	Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi yang ditetapkan	95%	95%	95%	95%
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi PD Setda yang berkualitas	Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda	Nilai RB PD Setda	B 67,00	B 67,50	B 68,00	B 68,50

4.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah di tetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun	(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang dikel / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang dikeluarkan) x 100%	Biro Pemerintahan
2	Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Usulan Kebijakan Daerah Dibidang Kesejahteraan Rakyat Yang Tersusun	(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah Yang Disusun/ Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah Yang Diusulkan) x 100%	Biro Kesejahteraan Rakyat
3	Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang hukum yang tersusun	Jumlah usulan kebijakan / jumlah rumusan kebijakan dibidang hukum x 100 %	Biro Hukum
4	Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang	(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

		tersusun	yang diusulkan) X 100%	
5	Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun	(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%	
6	Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun	(Jumlah realisasi Usulan Kebijakan yang menjadi Kebijakan / Jumlah target Usulan Kebijakan yang menjadi Kebijakan) X 100%	Biro Pengadaan Barang Jasa
7	Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi yang tersusun	(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%	Biro Organisasi
8	Meningkatkan Pelayanan Internal PD Setda	Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD Setda	Persentase Perhitungan Survey Pelayanan Internal Setda	Biro Umum

BAB. V

SETRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah,rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Bab ini memuat Strategi dan Kebijakan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya, maka rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2023 - 2026 mendukung seluruh Strategi dan arah kebijakan dimaksud serta sebagai upaya pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah maka tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026, strategi dan arah kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, tahun 2023 -2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel V sebagai berikut:

TABEL. V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Kebijakan Daerahyang berkualitas	1. Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	1.1. Meningkatkan rumusan arah kebijakan Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	1.1.1 Peningkatan kualitas koordinasi dan sinergitas antar penyelengaraan pemerintahan Daerah dalam merumuskan kebijakan dibidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum
	2. Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Perekonomian dan Pembangunan serta PengadaanBarang/jasa	2.1. Meningkatkan rumusan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	2.11. Peningkatan kualitas Koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan Pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perekonomian dan pembangunan serta pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa
	3. Meningkatnya Kebijakan Daerahdibagian Penataan Organisasi	3.1. Meningkatkan rumusan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan	3.11. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinergitas penyelenggaran Pemerintahan

		Penataanorganisasi	daerah dalam merumuskan kebijakan penataanorganisasi
Mewujudkan Reformasi BirokrasiPD Setda yang berkualitas	1. Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda	1.1 Peningkatan kemampuan Tata Kelola internal Sekretariat Daerah	1.1.1. Penguatan Tata kelola Pemerintahan yang berkulitas

V.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Sebagaimana diuraikan dalam table V diatas, Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang terbesar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan dukungan kebijakan, dituntut untuk mampu berperan sebagai Perangkat Dearah yang mampu meningkatkan kualitas kebijakan-kebijakan strategis Kepala Daerah yang disusun, sehingga diharapkan dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik *(Good Governance*), sehingga perlu dirumuskan dalam Renstra Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dengan sasaran yang meliputi :

1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Hukum;
2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
3. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan
4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Pengadaan Barang/Jasa
5. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Penataan Organisasi ;
6. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.

BAB. VI.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 mengacu kepada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023- 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut. Selain itu, Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Pemilihan kegiatan dari program prioritas tersebut dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi.

Indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana Tabel 6.1 berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah			75%	10,492,127,291	75%	10,984,890,160	75%	11,740,625,309	75%	12,199,755,366		45,417,398,126	
		03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			#REF!	1,258,497,148	#REF!	1,245,497,148.00	#REF!	1,486,273,148.00	#REF!	1,370,397,148	#REF!	5,360,664,592	
		03.1.01.01	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (dokumen)	N/A	38	220,000,000	25	218,000,000	25	365,000,000	25	218,000,000	113	1,021,000,000	
		03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (dokumen)	N/A	2	300,000,000	2	300,000,000	3	350,000,000	4	400,000,000	11	1,350,000,000	KAB/KOTA
		03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (dokumen)	N/A	2	738,497,148	3	727,497,148	4	771,273,148	5	752,397,148	14	2,989,664,592	
		03.1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**				2,533,630,143		2,689,393,012		2,854,352,161		3,079,358,218		11,156,733,534	
		03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	N/A	4	781,627,257	4	859,789,983.00	4	945,768,981	4	1,040,345,879	16	3,627,532,100	
		03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	N/A	3	1,200,000,000	3	1,250,000,000	3	1,300,000,000	3	1,400,000,000	12	5,150,000,000	
		03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	N/A	4	552,002,886	4	579,603,029	4	608,583,180	4	639,012,339	16	2,379,201,434	
		03.1.03	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**				6,700,000,000		7,050,000,000		7,400,000,000		7,750,000,000		28,900,000,000	
		03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	N/A	2	6,000,000,000	2	6,250,000,000	2	6,500,000,000	2	6,750,000,000	8	25,500,000,000	PK.PINANG
		03.1.03.02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	N/A	15	200,000,000	17	250,000,000	20	300,000,000	22	350,000,000	74	1,100,000,000	
		03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	N/A	6	500,000,000	6	550,000,000	6	600,000,000	6	650,000,000	24	2,300,000,000	
		4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**				1,208,154,112		1,333,898,372		1,461,866,476		1,541,669,856		5,611,972,083	
		4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				1,047,914,450	1160	1,152,705,895		1,267,976,485		1,328,390,866	5,194	4,863,370,962	
		4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah produk hukum pengaturan OPD mitra 1 yang disusun	N/A	90	813,981,579	100	895,379,737	110	984,917,711	120	1,083,409,482	420	3,777,688,508	
		4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang disusun	N/A	950	48,484,038	1000	53,332,442	1050	58,665,686	1100	64,532,255	4,100	225,014,420	
		4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya	N/A	115	135,574,102	125	149,131,512	135	164,044,663	145	180,449,130	520	629,199,407	
		4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum Kabupaten /Kota yang difasilitasi **dan dievaluasi**	N/A	28	49,874,731	35	54,862,204	42	60,348,425	49	66,383,267	154	231,468,627	
		4.01.05.1.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**				160,239,662		181,192,477		193,889,991		213,278,990	258	748,601,120	
		4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	N/A	4	115,431,943	6	126,975,137	8	139,672,651	10	153,639,916	28	535,719,647	
		4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi yang diselesaikan	N/A	50	44,807,719	55	54,217,340	60	54,217,340	65	59,639,074	230	212,881,473	
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	**04.**	**Program Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Usulan Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun**	N/A	80%	70,148,469,544	80%	77,054,548,999	80%	84,651,236,400	80%	91,919,917,540	80%	323,774,172,483	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		04.1.01	**Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang dikeluarkan**	N/A	85%	11,525,750,742	85%	12,678,325,816	85%	13,946,158,398	85%	15,340,774,238	85%	53,491,009,194	KAB/KOTA
		04.1.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah unit sarana dan prasarana spiritual yang dikelola	N/A	100	9,883,742,789	100	10,872,117,068	100	11,959,328,775	100	13,155,261,653	400	45,870,450,285	
		04.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	N/A	60	1,642,007,953	60	1,806,208,748	60	1,986,829,623	60	2,185,512,585	240	7,620,558,910	
		04.1.02	**Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dikeluarkan	N/A	85%	58,443,270,474	85%	64,178,830,022	85%	70,487,945,525	85%	77,427,972,577	85%	270,538,018,598	KAB/KOTA
		04.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	N/A	60	11,780,372,234	70	11,832,508,223	80	11,889,857,811	90	11,952,942,357	300	47,455,680,625	
		04.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	N/A	50	90,313,005	60	99,344,306	70	109,278,737	80	120,206,611	260	419,142,659	
		04.1.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	N/A	160	46,572,585,235	170	52,246,977,493	180	58,488,808,977	190	65,354,823,609	700	222,663,195,314	
		04.1.03	**Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dikeluarkan	N/A	85%	179,448,328	85%	197,393,161	85%	217,132,477	85%	238,845,725	85%	832,819,691	KAB/KOTA
		04.1.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan,Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	N/A	12	76,687,213	12	84,355,934	12	92,791,527	12	102,070,680	48	355,905,355	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Laporan Bahan Usulan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	N/A	12	50,000,000	12	55,000,000	12	60,500,000	12	66,550,000	48	232,050,000	
		04.1.03.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	N/A	12	52,761,115	12	58,037,227	12	63,840,950	12	70,225,045	48	244,864,337	
		BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					**1,934,000,000**		**2,161,400,000**		**2,404,500,000**		**2,624,000,000**		**9,123,900,000**	
Mewujudkan Reformasi Birokrasi PD Setda yang berkualitas Indikator : Pencapaian RB PD Setda	Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda Indikator : Nilai RB PD Setda	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD Setda		77.5	450,000,000	78	495,000,000	78.5	537,500,000	79	575,000,000	79	2,057,500,000	
		4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD Setda yang disusun tepat waktu		95%	450,000,000	95%	495,000,000	95%	537,500,000	95%	575,000,000	95%	2,057,500,000	
		4.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	285,000,000	2 Dokumen	295,000,000	2 Dokumen	300,000,000	8 Dokumen	1,155,000,000	Pangkalpinang
		4.01.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	13,500,000	1 Dokumen	15,000,000	4 Dokumen	50,500,000	Pangkalpinang
		4.01.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	13,500,000	1 Dokumen	15,000,000	4 Dokumen	50,500,000	Pangkalpinang
		4.01.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	13,500,000	1 Dokumen	15,000,000	4 Dokumen	50,500,000	Pangkalpinang
		4.01.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	13,500,000	1 Dokumen	15,000,000	4 Dokumen	50,500,000	Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4.01.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	12,000,000	2 Laporan	13,500,000	2 Laporan	15,000,000	8 Laporan	50,500,000	Pangkalpinang
		4.01.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	125,000,000	5 Laporan	150,000,000	5 Laporan	175,000,000	5 Laporan	200,000,000	20 Laporan	650,000,000	Pangkalpinang
Mewujudkan Kebijakan Daerah yang berkualitas Indikator : Persentase Kebijakan Daerah yang terimplementasi	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi Indikator : Persentase Kebijakan Daerah dibagian Penataan Organisasi yang ditetapkan	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun		75%	1,075,000,000	75%	1,195,000,000	75%	1,320,000,000	75%	1,440,000,000	75%	5,030,000,000	
		4.01.06.1.01	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian yang dikeluarkan		65%	450,000,000	65%	475,000,000	65%	510,000,000	65%	550,000,000	65%	1,985,000,000	
		4.01.06.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		12 Dokumen	250,000,000	12 Dokumen	260,000,000	12 Dokumen	275,000,000	12 Dokumen	300,000,000	48 Dokumen	1,085,000,000	Pangkalpinang
		4.01.06.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi MIkro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		12 Dokumen	200,000,000	12 Dokumen	215,000,000	12 Dokumen	235,000,000	12 Dokumen	250,000,000	48 Dokumen	900,000,000	Pangkalpinang
		4.01.06.1.02	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang dikeluarkan		65%	375,000,000	65%	450,000,000	65%	510,000,000	65%	575,000,000		1,910,000,000	
		4.01.06.1.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		12 Dokumen	75,000,000	12 Dokumen	100,000,000	12 Dokumen	110,000,000	12 Dokumen	125,000,000	48 Dokumen	410,000,000	Pangkalpinang
		4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		12 Dokumen	150,000,000	12 Dokumen	175,000,000	12 Dokumen	200,000,000	12 Dokumen	225,000,000	48 Dokumen	750,000,000	Pangkalpinang
		4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		12 Dokumen	150,000,000	12 Dokumen	175,000,000	12 Dokumen	200,000,000	12 Dokumen	225,000,000	48 Dokumen	750,000,000	Pangkalpinang
		4.01.06.1.03	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yang dikeluarkan		65%	250,000,000	65%	270,000,000	65%	300,000,000	65%	315,000,000		1,135,000,000	
		4.01.06.1.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		5 Dokumen 85,000,000		5 Dokumen 90,000,000		5 Dokumen 110,000,000		5 Dokumen 115,000,000		20 Dokumen	400,000,000	Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	4 Dokumen	160,000,000	Pangkalpinang
		4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen	-	Pangkalpinang
		4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		5 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	65,000,000	5 Dokumen	75,000,000	5 Dokumen	85,000,000	20 Dokumen	275,000,000	Pangkalpinang
		4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	75,000,000	4 Dokumen	300,000,000	Pangkalpinang
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun		75%	409,000,000	75%	471,400,000	75%	547,000,000	75%	609,000,000		2,036,400,000	
		4.01.08.1.01	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan		65%	225,000,000	65%	260,000,000	65%	295,000,000	65%	330,000,000		1,110,000,000	
		4.01.08.1.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		4 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	55,000,000	4 Dokumen	60,000,000	4 Dokumen	65,000,000	16 Dokumen	230,000,000	Pangkalpinang
		4.01.08.1.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		4 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	55,000,000	4 Dokumen	60,000,000	4 Dokumen	65,000,000	16 Dokumen	230,000,000	Pangkalpinang
		4.01.08.1.01.03	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		4 Dokumen	125,000,000	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	175,000,000	4 Dokumen	200,000,000	16 Dokumen	650,000,000	Pangkalpinang
		4.01.08.1.02	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan		65%	184,000,000	65%	211,400,000	65%	252,000,000	65%	279,000,000		926,400,000	
		4.01.08.1.02.01	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan		12 Dokumen	60,000,000	12 Dokumen	75,000,000	12 Dokumen	100,000,000	12 Dokumen	115,000,000	48 Dokumen	350,000,000	Pangkalpinang
		4.01.08.1.02.02	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		6 Dokumen	74,000,000	6 Dokumen	81,400,000	6 Dokumen	92,000,000	6 Dokumen	99,000,000	24 Dokumen	346,400,000	Pangkalpinang
		4.01.08.1.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		6 Dokumen	50,000,000	6 Dokumen	55,000,000	6 Dokumen	60,000,000	6 Dokumen	65,000,000	24 Dokumen	230,000,000	Pangkalpinang
Mewujudka	Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian	4	**Program Kebijakan dan Pelayanan Barang dan Jasa**				3,146,968,545	80%	3,209,907,916	80%	3,274,826,074	80%	3,339,588,196	80%	12,971,290,731	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
n Kebijakan Daerah yang berkualitas	Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	4.01.07.1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**				1,089,750,000	60%	1,111,545,000	60%	1,133,775,900	60%	1,156,451,418	60%	4,491,522,318	
		4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	N/A	12	141,500,000	12	144,330,000	12	147,216,600	12	150,160,932	48	583,207,532	PANGKALPINANG
		4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	N/A	12	826,500,000	12	843,030,000	12	859,890,600	12	877,088,412	48	3,406,509,012	
		4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	N/A	12	121,750,000	12	124,185,000	12	126,668,700	12	129,202,074	48	501,805,774	
		07.1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronika**				1,617,218,545	60%	1,649,562,916	60%	1,682,554,174	60%	1,716,205,258	60%	6,665,540,893	
		07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	N/A	12	1,427,218,545	12	1,455,762,916	12	1,484,878,174	12	1,514,575,738	48	5,882,435,373	
		07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi (Laporan)	N/A	12	105,000,000	12	107,100,000	12	109,242,000	12	111,426,840	48	432,768,840	
		07.1.02.03	Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	N/A	12	85,000,000	12	86,700,000	12	88,434,000	12	90,202,680	48	350,336,680	
		07.1.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**				440,000,000	60%	448,800,000	60%	458,496,000	60%	466,931,520	60%	1,814,227,520	
		07.1.03.01	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	N/A	12	120,000,000	12	122,400,000	12	124,848,000	12	127,344,960	48	494,592,960	
		07.1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	N/A	45	200,000,000	45	204,000,000	45	208,800,000	45	212,241,600	180	825,041,600	
		07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi dan /atau Bintek Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/ atau Bintek Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	N/A	12	120,000,000	12	122,400,000	12	124,848,000	12	127,344,960	48	494,592,960	

		BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG														
Mewujudkan Reformasi Birokrasi PD Setda yang berkualitas Indikator : Pencapaian RB PD Setda	Meningkatkan Tata Kelola Internal PD Setda Indikator : Nilai RB PD Setda	4.01.02	**PENATAAN ORGANISASI**	**Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi**		**80%**	**1,940,772,521**	**80%**	**2,134,849,773**	**80%**	**2,348,334,749**	**80%**	**2,583,168,227**	**80%**	7,466,420,240	
		4.01.02.1.01	**Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisisis Jabatan yang dikeluarkan**		**80%**	**621,241,770**	**80%**	**683,365,946**	**80%**	**751,702,541**	**80%**	**826,872,797**	**80%**	2,883,183,054	
		4.01.02.1.01.01	**Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi**	Jumlah dokumen hasil Penataan Kelembagaan Provinsi		12	140,027,724	12	154,030,496	12	169,433,546	12	186,376,901	48	649,868,667	Pangkalpinang
		4.01.02.1.01.02	**Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/kota		12	206,620,002	12	227,282,002	12	250,010,202	12	275,011,223	48	958,923,429	Pangkalpinang
		4.01.02.1.01.03	**Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan**	Jumlah dokumen hasil Analisis Jabatan,Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan		12	274,594,044	12	302,053,448	12	332,258,793	12	365,484,673	48	1,274,390,958	Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4.01.02.1.02	**Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**Persentase Rumusan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja,Budaya Kerja dan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan**		**80%**	**987,553,800**	**80%**	**1,086,309,180**	**85%**	**1,194,940,098**	**85%**	**1,314,434,108**	**85%**	**4,583,237,186**	Pangkalpinang
				Persentase Rumusan Kebijakan Tata Laksana Pemerintahn dan Pelayanan Publik yang di keluarkan		**80%**	**331,976,951**	**80%**	**365,174,647**	**80%**	**401,692,110**	**80%**	**441,861,322**	**80%**	**1,540,705,030**	Pangkalpinang
		4.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan RB		12	527,391,000	12	580,130,100	12	638,143,110	12	701,957,421	48	2,447,621,631	Pangkalpinang
		4.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		12	271,244,800	12	298,369,280	12	328,206,208	12	361,026,829	48	1,258,847,117	Pangkalpinang
		4.01.02.1.02.03	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		27	188,918,000	27	207,809,800	27	228,590,780	27	251,449,858	108	876,768,438	Pangkalpinang
		4.01.02.1.02.04	**Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan**	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		33	70,257,926	33	77,283,719	33	85,012,090	33	93,513,300	132	326,067,035	Pangkalpinang
		4.01.02.1.02.05	**Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik**	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan Pelayanan Publik		12	261,719,025	12	287,890,928	12	316,680,020	12	348,348,022	48	1,214,637,995	Pangkalpinang
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			**80%**	**99,978,300,000**	**82%**	**110,496,530,000**	**83%**	**121,545,183,000**	**85%**	**133,698,701,300**	**85%**	**465,718,714,300**	
		01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			82%	42,607,794,954	83%	46,868,574,449	84%	51,555,431,894	85%	56,710,975,084	85%	197,742,776,382	
		01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	275	42,478,194,954	285	46,726,014,449	292	51,398,615,894	299	56,538,477,484	1151	197,141,302,782	Pangkalpinang
		01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Akuntasi SKPD	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	4	464,100,000	Pangkalpinang
		01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	N/A	3		3	-	3	-	3	-	12	-	Pangkalpinang
		01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	18	29,600,000	18	32,560,000	18	35,816,000	18	39,397,600	72	137,373,600	Pangkalpinang
		01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			82%	178,200,000	83%	196,020,000	84%	215,622,000	85%	237,184,200	85%	827,026,200	
		01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.03.04	Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	12	178,200,000	12	196,020,000	12	215,622,000	12	237,184,200	48	827,026,200	Pangkalpinang
		01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**			82%	10,000,000	83%	10,000,000	84%	10,000,000	85%	10,000,000	85%	40,000,000	
		01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Derah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.04.03	Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	N/A	1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	4	14,000,000	Pangkalpinang
		01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	N/A	1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	4	14,000,000	Pangkalpinang
		01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	N/A	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	4	12,000,000	Pangkalpinang
		01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			82%	1,016,000,000	83%	1,111,000,000	84%	1,222,100,000	85%	1,344,310,000	85%	4,693,410,000	
		01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	5	6,000,000	0	-	0	-	0	-	5	6,000,000	Pangkalpinang
		01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	N/A	1	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	1	665,500,000	4	2,320,500,000	Pangkalpinang
		01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	01.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun yang Dipulangkan	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.05.07	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang dipindah Tugaskan	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	20	150,000,000	20	165,000,000	20	181,500,000	20	199,650,000	80	696,150,000	Pangkalpinang
		01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	20	150,000,000	20	165,000,000	20	181,500,000	20	199,650,000	80	696,150,000	Pangkalpinang
		01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	10	210,000,000	10	231,000,000	10	254,100,000	10	279,510,000	40	974,610,000	Pangkalpinang
		01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			82%	16,738,957,250	83%	18,412,852,975	84%	20,254,138,273	85%	22,279,552,100	85%	77,685,500,597	
		01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	12	650,000,000	12	715,000,000	12	786,500,000	12	865,150,000	48	3,016,650,000	Pangkalpinang
		01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK,Bahan Komputer, Alat & Bahan u Kelengkapan kantor Lainnya)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	12	200,000,000	12	220,000,000	12	242,000,000	12	266,200,000	48	928,200,000	Pangkalpinang
		01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Perabot Kantor)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	N/A	1	190,000,000	1	209,000,000	1	229,900,000	1	252,890,000	4	881,790,000	Pangkalpinang
		01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Tabung Gas dan Pakan Natura)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	12	90,000,000	12	99,000,000	12	108,900,000	12	119,790,000	48	417,690,000	Pangkalpinang
		01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Bahan Cetak)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	12	450,000,000	12	495,000,000	12	544,500,000	12	598,950,000	48	2,088,450,000	Pangkalpinang
		01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Surat Kabar/Majalah)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	N/A	12	180,000,000	12	198,000,000	12	217,800,000	12	239,580,000	48	835,380,000	Pangkalpinang
		01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material (ATK, Kertas & Cover, Bahan Komputer)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A	12	850,000,000	12	935,000,000	12	1,028,500,000	12	1,131,350,000	48	3,944,850,000	Pangkalpinang
		01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Suvenir, Pakan Natera, Makmin Jamuan Tamu, Makmin Aktifitas Lap, Sewa Hotel & Perjadin)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	N/A	12	8,128,957,250	12	8,941,852,975	12	9,836,038,273	12	10,819,642,100	48	37,726,490,597	Pangkalpinang
		01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Makmin Rapat, Perjadin Biasa, Perjadin Luar Negeri)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	12	6,000,000,000	12	6,600,000,000	12	7,260,000,000	12	7,986,000,000	48	27,846,000,000	Pangkalpinang
		01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			82%	6,937,750,000	83%	8,159,525,000	84%	8,975,477,500	85%	9,873,025,250	85%	33,945,777,750	
		01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	3	900,000,000	3	990,000,000	3	1,089,000,000	3	1,197,900,000	12	4,176,900,000	Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	4	3,280,000,000	4	3,608,000,000	4	3,968,800,000	5	4,365,680,000	17	15,222,480,000	Pangkalpinang
		01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	N/A	0	-	3	33,000,000	4	36,300,000	4	39,930,000	11	109,230,000	Pangkalpinang
		01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	3	322,000,000	3	354,200,000	3	389,620,000	3	428,582,000	12	1,494,402,000	Pangkalpinang
		01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	50	1,345,750,000	50	1,480,325,000	55	1,628,357,500	60	1,791,193,250	215	6,245,625,750	Pangkalpinang
		01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	N/A	5	40,000,000	5	44,000,000	5	48,400,000	5	53,240,000	20	185,640,000	Pangkalpinang
		01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud Yang Disediakan	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	0	-	1	495,000,000	1	544,500,000	1	598,950,000	3	1,638,450,000	Pangkalpinang
		01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	3	737,000,000	3	810,700,000	3	891,770,000	3	980,947,000	12	3,420,417,000	Pangkalpinang
		01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	3	313,000,000	3	344,300,000	3	378,730,000	3	416,603,000	12	1,452,633,000	Pangkalpinang
		01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			82%	14,340,500,000	83%	15,774,550,000	84%	17,352,005,000	85%	19,087,205,500	85%	66,554,260,500	
		01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	12	40,500,000	12	44,550,000	12	49,005,000	12	53,905,500	48	187,960,500	Pangkalpinang
		01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12	4,500,000,000	12	4,950,000,000	12	5,445,000,000	12	5,989,500,000	48	20,884,500,000	Pangkalpinang
		01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	12	2,000,000,000	12	2,200,000,000	12	2,420,000,000	12	2,662,000,000	48	9,282,000,000	Pangkalpinang
		01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12	7,800,000,000	12	8,580,000,000	12	9,438,000,000	12	10,381,800,000	48	36,199,800,000	Pangkalpinang
		01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			82%	9,565,250,000	83%	10,521,775,000	84%	11,573,952,500	85%	12,731,347,750	85%	44,392,325,250	
		01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	N/A	16	897,705,500	16	987,476,050	16	1,086,223,655	16	1,194,846,021	64	4,166,251,226	Pangkalpinang
		01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	78	2,633,869,150	83	2,897,256,065	88	3,186,981,672	90	3,505,679,839	339	12,223,786,725	Pangkalpinang
		01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	100	180,000,000	120	198,000,000	140	217,800,000	150	239,580,000	510	835,380,000	Pangkalpinang
		01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	50	895,925,745	55	985,518,320	60	1,084,070,151	65	1,192,477,167	230	4,157,991,383	Pangkalpinang
		01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	6	3,613,719,605	6	3,975,091,566	6	4,372,600,722	6	4,809,860,794	24	16,771,272,687	Pangkalpinang
		01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	6	1,094,030,000	6	1,203,433,000	6	1,323,776,300	6	1,456,153,930	24	5,077,393,230	Pangkalpinang
		01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	N/A	4	250,000,000	4	275,000,000	4	302,500,000	4	332,750,000	16	1,160,250,000	Pangkalpinang
		01.1.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah Yang Dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pangkalpinang
		01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			80%	1,554,610,296	82%	1,710,071,326	83%	1,881,078,458	85%	2,069,186,304	85%	7,214,946,384	
		01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A	14	139,610,296	14	153,571,326	14	168,928,458	14	185,821,304	56	647,931,384	Pangkalpinang
		01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	N/A	2	85,000,000	2	93,500,000	2	102,850,000	2	113,135,000	8	394,485,000	Pangkalpinang
		01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A	6	80,000,000	6	88,000,000	6	96,800,000	6	106,480,000	24	371,280,000	Pangkalpinang
		01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A	12	1,250,000,000	12	1,375,000,000	12	1,512,500,000	12	1,663,750,000	48	5,801,250,000	Pangkalpinang
		01.1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**			82%	1,905,237,500	83%	2,095,761,250	84%	2,305,337,375	85%	2,535,871,113	85%	8,842,207,238	
		01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	N/A	12	879,000,000	12	966,900,000	12	1,063,590,000	12	1,169,949,000	48	4,079,439,000	Pangkalpinang
		01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	N/A	12	212,137,500	12	233,351,250	12	256,686,375	12	282,355,013	48	984,530,138	Pangkalpinang
		01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan\	N/A	12	814,100,000	12	895,510,000	12	985,061,000	12	1,083,567,100	48	3,778,238,100	Pangkalpinang
		01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**			80%	1,890,000,000	82%	2,079,000,000	83%	2,286,900,000	85%	2,515,590,000	85%	8,771,490,000	
		01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	N/A	12	130,000,000	12	143,000,000	12	157,300,000	12	173,030,000	48	603,330,000	Pangkalpinang
		01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	N/A	12	1,160,000,000	12	1,276,000,000	12	1,403,600,000	12	1,543,960,000	48	5,383,560,000	Pangkalpinang
		01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	N/A	12	600,000,000	12	660,000,000	12	726,000,000	12	798,600,000	48	2,784,600,000	Pangkalpinang
		01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**			80%	3,234,000,000	82%	3,557,400,000	83%	3,913,140,000	85%	4,304,454,000	85%	15,008,994,000	
		01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	N/A	12	1,000,000,000	12	1,100,000,000	12	1,210,000,000	12	1,331,000,000	48	4,641,000,000	Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A	12	800,000,000	12	880,000,000	12	968,000,000	12	1,064,800,000	48	3,712,800,000	Pangkalpinang
		01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	N/A	12	1,434,000,000	12	1,577,400,000	12	1,735,140,000	12	1,908,654,000	48	6,655,194,000	Pangkalpinang

BAB. VII
KINERJA URUSAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada rumusan indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepuluan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Pencapaian kinerja secara maksimal Sekretaris Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung, diharapkan dapat mendukung program Pemerintah Tahun 2023 – 2026 untuk dapat mengetahui keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan target yang harus dicapai berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah melalui nilai Reformasi Birokrasi senilai 68,50 dengan kriteria penilaian B sebagai berikut :

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPD.

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B 66,08	B 66,10	B 67,10	B 68,00	B 68,50	B 68,50

BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah Dokumen perencanaan bidang/urusan Pemerintahan untuk periode 4 (empat) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yangtelah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalamRencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah. Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEP. BANGKA BELITUNG

Dr. Drs. NAZIARTO, SH., MH
NIP. 19640321 199103 1 009

FORM 4

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD Setda	PERHITUNGANBIRO ORGANISASI	77.5%	78%	78.5%	79%	450,000,000	495,000,000	537,500,000	575,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD Setda yang disusun tepat waktu	(Jumlah Tahapan yang tepat waktu / Jumlah Tahapan yang dilakukan) X 100%	95%	95%	95%	95%	450,000,000	495,000,000	537,500,000	575,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penjumlahan Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	275,000,000	285,000,000	295,000,000	300,000,000
		PERHITUNGANBIRO ORGANISASI											(Jumlah Tahapan yang tepat waktu / Jumlah Tahapan yang dilakukan) X 100%									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Penjumlahan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	12,000,000	13,500,000	15,000,000
		PERHITUNGANBIRO ORGANISASI											(Jumlah Tahapan yang tepat waktu / Jumlah Tahapan yang dilakukan) X 100%									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Penjumlahan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	12,000,000	13,500,000	15,000,000
		PERHITUNGANBIRO ORGANISASI											(Jumlah Tahapan yang tepat waktu / Jumlah Tahapan yang dilakukan) X 100%									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Penjumlahan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	12,000,000	13,500,000	15,000,000
		PERHITUNGANBIRO ORGANISASI											(Jumlah Tahapan yang tepat waktu / Jumlah Tahapan yang dilakukan) X 100%									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penjumlahan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	12,000,000	13,500,000	15,000,000
		PERHITUNGANBIRO ORGANISASI											(Jumlah Tahapan yang tepat waktu / Jumlah Tahapan yang dilakukan) X 100%									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Penjumlahan Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	12,000,000	13,500,000	15,000,000
		PERHITUNGANBIRO ORGANISASI											(Jumlah Tahapan yang tepat waktu / Jumlah Tahapan yang dilakukan) X 100%									Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penjumlahan Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	125,000,000	150,000,000	175,000,000	200,000,000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun	(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%	75%	75%	75%	75%	############	Rp1,195,000,000	Rp1,320,000,000	Rp1,440,000,000	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian yang dikeluarkan	(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%	65%	65%	65%	65%	450,000,000	475,000,000	510,000,000	550,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Penjumlahan Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	250,000,000	260,000,000	275,000,000	300,000,000
		(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%											(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%									Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi MIkro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Penjumlahan Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	200,000,000	215,000,000	235,000,000	250,000,000

		(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%									Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi Sumber Daya Alam yang dikeluarkan	(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%	65%	65%	65%	65%	375,000,000	450,000,000	510,000,000	575,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Penjumlahan Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75,000,000	100,000,000	110,000,000	125,000,000
		(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%											(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%									Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Penjumlahan Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	150,000,000	175,000,000	200,000,000	225,000,000
		(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%											(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%									Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Penjumlahan Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	150,000,000	175,000,000	200,000,000	225,000,000
		(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%									Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yang dikeluarkan	(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%	65%	65%	65%	65%	250,000,000	270,000,000	300,000,000	315,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Penjumlahan Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	85,000,000	90,000,000	110,000,000	115,000,000
		(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%											(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%									Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Penjumlahan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
		(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%											(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%									Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Penjumlahan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%											(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%									Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Penjumlahan Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	65,000,000	75,000,000	85,000,000
		(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%											(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan									Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Penjumlahan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000

PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun	(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%	75%	75%	75%	75%	409,000,000	471,400,000	547,000,000	609,000,000	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%	65%	65%	65%	65%	225,000,000	260,000,000	295,000,000	330,000,000	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Penjumlahan Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000
		(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%											(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%									Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Penjumlahan Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000
		(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%											(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%									Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Penjumlahan Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	125,000,000	150,000,000	175,000,000	200,000,000
		(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%									Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan	(Jumlah Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan / Jumlah Usulan Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang ada) x 100%	65%	65%	65%	65%	184,000,000	211,400,000	252,000,000	279,000,000	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Penjumlahan Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	60,000,000	75,000,000	100,000,000	115,000,000
		(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%											(Jumlah Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan / Jumlah Usulan Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang ada) x 100%									Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penjumlahan Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	74,000,000	81,400,000	92,000,000	99,000,000
		(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%											(Jumlah Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikeluarkan / Jumlah Usulan Rekomendasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang ada) x 100%									Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Penjumlahan Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000

FORM 4

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	•Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang hukum yang tersusun	Jumlah usulan kebijakan / jumlah rumusan kebijakan dibidang hukum x 100 %	85	90	95	95	1,208,154,112	1,328,969,523	1,461,866,476	1,608,053,123	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Presentase Rumusan kebijakan penataan perundang-undangan Pemerintah Provinsi yang dikeluarkan	Jumlah rumusan kebijakan yang dikeluarkan/ Jumlah bahan rumusan kebijakan yang dibuat x 100%	85	90	95	95	1,047,914,450	1,152,705,895	1,267,976,485	1,394,774,133	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah produk hukum pengaturan OPD mitra 1 yang disusun	Penjumlahan Dokumen	90	100	110	120	813,981,579	8,953,797,367	984,917,711	1,083,409,482
																						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang disusun	Penjumlahan Dokumen	950	1000	1050	1100	48,484,038	53,332,442	58,665,686	64,532,255
																						Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah produk hukum yang didokumentasi dan dikeloia informasi hukumnya	Penjumlahan Dokumen	115	125	135	145	135,574,102	149,131,512	164,044,663	180,449,130
																						Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota	•Jumlah produk hukum Kabupaten /Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	Penjumlahan Dokumen	28	35	42	49	49,874,731	54,862,204	60,348,425	66,383,267
											Fasilitasi Bantuan Hukum	Presentase Rekomendasi penerapan kebijakan yang menjamin kepastian dan keadilan hukum Pemda dan Masyarakat	Jumlah rekomendasi produk hukum yang disahkan/Jumlah produk hukum yang disusun x 100%	85	90	95	95	160,239,662	176,263,628	193,889,991	213,278,990	•Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	Penjumlahan Kasus	4	6	8	10	115,431,943	126,975,137	139,672,651	153,639,916
																						• Fasilitasi penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi yang diselesaikan	Penjumlahan Kasus	50	55	60	65	44,807,719	49,288,491	54,217,340	59,639,074

Mengetahui
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Drs. Muhammad Soleh, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198903 1 008

Pangkapinang, Juni 2022
Kepala Biro Hukum,

Syaifuddin, S.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19630312 198503 1 013

FORM 4

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE USULAN KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERSUSUN	(JUMLAH USULAN KEBIJAKAN DAERAH YANG DISUSUN/JUMLAH RUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH YANG DIUSULKAN) X 100%	80%	80%	80%	80%	###########	###########	###########	###########	FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL	PERSENTASE RUMUSAN KEBIJAKAN FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL YANG DIKELUARKAN	(JUMLAH RUMUSAN KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN/JUMLAH BAHAN RUMUSAN KEBIJAKAN YANG DIBUAT) x 100%	85%	85%	85%	85%	###########	###########	###########	###########	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SPIRITUAL	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA SPIRITUAL YANG	PENJUMLAHAN UNIT	100	100	100	100	9,883,742,789	###########	###########	###########
																						FASILITASI KELEMBAGAAN BINA SPIRITUAL	JUMLAH LEMBAGA BINA SPIRITUAL YANG DIFASILITASI	PENJUMLAHAN	60	60	60	60	1,642,007,953	1,806,208,748	1,986,829,623	###########
																													###########	###########	###########	###########
											FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR	PERSENTASE RUMUSAN KEBIJAKAN FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR YANG DIKELUARKAN	(JUMLAH RUMUSAN KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN/JUMLAH BAHAN RUMUSAN KEBIJAKAN YANG DIBUAT) x 100%	85%	85%	85%	85%	179,448,328	197,393,161	217,132,477	238,845,725	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KEPEMUDAAN,	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KEPEMUDAAN,	PENJUMLAHAN DOKUMEN	12	12	12	12	76,687,213	84,355,934	92,791,527	102,070,680
																						KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN	PENJUMLAHAN DOKUMEN	12	12	12	12	52,761,115	58,037,227	63,840,950	70,225,045
																						KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN, DAN	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN, DAN PERHUBUNGAN	PENJUMLAHAN DOKUMEN	12	12	12	12	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000
																													179,448,328	**197,393,161**	**217,132,477**	**238,845,725**
											FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR	PERSENTASE RUMUSAN KEBIJAKAN FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR YANG DIKELUARKAN	(JUMLAH RUMUSAN KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN/JUMLAH BAHAN RUMUSAN KEBIJAKAN YANG DIBUAT) x 100%	85%	85%	85%	85%	###########	###########	###########	###########	FASILITASI, KOORDINASI, SINKRONISASI, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	JUMLAH DOKUMEN HASIL FASILITASI, KOORDINASI, SINKRONISASI, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN	PENJUMLAHAN DOKUMEN	60	70	80	90	521,359,887	573,495,876	630,845,464	693,930,010
																						FASILITASI, KOORDINASI, SINKRONISASI, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	JUMLAH DOKUMEN HASIL FASILITASI, KOORDINASI, SINKRONISASI, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN	PENJUMLAHAN DOKUMEN	50	60	70	80	90,313,005	99,344,306	109,278,737	120,206,611
																						FASILITASI, KOORDINASI, SINKRONISASI, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	JUMLAH DOKUMEN HASIL FASILITASI, KOORDINASI, SINKRONISASI, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN	PENJUMLAHAN DOKUMEN	160	170	180	190	###########	###########	###########	###########
																		###########	###########	###########	###########								###########	###########	###########	###########

########### ########### Rp 56,743,922,582 ########### Rp 62,418,314,840 ########### Rp 68,660,146,324 ########### ###########

2023 2024 2025 2026

MENGETAHUI
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640324 198903 1 008

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

H. SAIMI, S.H., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651110 198603 1 012

FORM 4

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
PENATAAN ORGANSIASI	Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi	(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%	80%	80%	80%	80%	1,940,772,521	2,134,849,773	2,348,334,749	2,583,168,227	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Rumusan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja, Budaya Kerja dan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan	(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%	80%	80%	85%	85%	1.319.530.751	1,451,483,827	1,596,632,208	1,756,295,430	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang disusun pada tahun berjalan	12	12	12	12	271.244.800	298.369.280	328.206.208	361.026.829
																						Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan budaya kerja	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan budaya kerja yang disusun pada tahun berjalan	27	27	27	27	188,918,000	207,809,800	228,590,780	251,449,858
																						Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen hasil pembinaan pelaksanaan RB	Jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan RB yang disusun pada tahun berjalan	12	12	12	12	527,391,000	580,130,100	638,143,110	701,957,421
												Persentase Rumusan Kebijakan Tatalaksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dikeluarkan	(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%	80%	80%	80%	80%					Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Tatalaksanan Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Tatalaksanan Pemerintahan yang disusun pada tahun berjalan	33	33	33	33	70,257,926	77,283,719	85,012,090	93,513,300
																						Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik yang disusun pada tahun berjalan	12	12	12	12	261,719,025	287,890,928	316,680,020	348,348,022
											Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang dikeluarkan	(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Daerah yang dibuatkan) X 100%	80%	80%	80%	80%	621,241,770	683,365,946	751,702,541	826,872,797	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan Kab/Kota yang disusun pada tahun berjalan	12	12	12	12	206,620,002	227,282,002	250,010,202	275,011,223
																						Fasilitasi Penataan kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan Provinsi yang disusun pada Tahun berjalan	12	12	12	12	140,027,724	154,030,496	169,433,546	186,376,901
																						Penataan Analisa Jabatan	Jumlah dokumen hasil Analis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan yang disusun pada tahun berjalan	12	12	12	12	274,594,044	302,053,448	332,258,793	365,484,673

MENGETAHUI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. YUNAN HELMI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA / IV D
NIP. 19670505 199203 1 009

PANGKALPINANG, JUNI 2022
MENGETAHUI
KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. Dra. ELLYANA, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV C
NIP. 19660312 199203 2 006

FORM 4

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun	(Jumlah Usulan Kebijakan Daerah yang disusunkan / Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah yang diusulkan) X 100%	80%	80%	80%	80%	3,148,968,545.00	3,209,907,916.00	3,274,106,074.00	3,339,608,196.00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah bahan Rumusan Kebijakan yang dibuat) X 100%	60%	60%	60%	60%	1,091,750,000	1,111,545,000	1,133,775,900	1,156,471,418	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Penjumlahan Laporan	12	12	12	12	141,500,000	144,330,000	147,216,600	150,180,932
																						Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	Penjumlahan Laporan	12	12	12	12	828,500,000	843,030,000	859,890,600	877,088,412
																						Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Penjumlahan Laporan	12	12	12	12	121,750,000	124,185,000	126,668,700	129,202,074
											Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronika	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dikeluarkan	(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah bahan Rumusan Kebijakan yang dibuat) X 100%	60%	60%	60%	60%	1,617,218,545	1,649,562,916	1,682,554,174	1,716,205,258	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Penjumlahan Laporan	12	12	12	12	1,427,218,545	1,455,762,916	1,484,878,174	1,514,575,738
																						Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Penjumlahan Laporan	12	12	12	12	105,000,000	107,100,000	109,242,000	111,426,840
																						Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Penjumlahan Laporan	12	12	12	12	85,000,000	86,700,000	88,434,000	90,202,680
											Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rumusan Kebijakan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah bahan Rumusan Kebijakan yang dibuat) X 100%	60%	60%	60%	60%	440,000,000	448,800,000	457,776,000	466,931,520	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Penjumlahan Dokumen	12	12	12	12	120,000,000	122,400,000	124,848,000	127,344,960
																						Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Penjumlahan Orang	45	45	45	45	200,000,000	204,000,000	208,080,000	212,241,600
																						Pendampingan, Konsultasi dan /atau Bintek Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/ atau Bintek Pengadaan Barang dan Jasa	Penjumlahan Dokumen	12	12	12	12	120,000,000	122,400,000	124,848,000	127,344,960

MENGETAHUI
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

YANJUAR, S.H.,M.H
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640608 198603 1 008

PANGKALPINANG, JUNI 2022
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

HARTONO,S.E
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641212 198903 1 015

FORM 4

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Usulan Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dikeluarkan	Jumlah Rumusan Usulan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Rumusan Kebijakan yang dibuat) X 100%	75%	75%	75%	75%	10,492,127,291	10,984,890,160	11,740,625,309	12,199,755,366	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang dikeluarkan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan/ Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan X 100%	75%	75%	75%	75%	1,258,497,148.00	1,245,497,148.00	1,486,273,148.00	1,370,397,148.00	Pengelolaan AdministrasiPengelolaan Administrasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen	38	25	25	25	220,000,000	218,000,000	365,000,000	218,000,000
																						Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	2	2	3	4	300,000,000	300,000,000	350,000,000	400,000,000
																						Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen	2	3	4	5	738,497,148	727,497,148	771,273,148	752,397,148
											Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Rumusan kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan	(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan) X 100%	75%	75%	75%	75%	2,533,630,143.00	2,689,393,012.00	2,854,352,161.00	3,079,358,218.00	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi	Jumlah Dokumen	4	4	4	4	781,627,257	859789983	945768981	1,040,345,879
																						Pengembangan Otonomi dan Penataan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan	Jumlah Dokumen	3	3	3	3	1,200,000,000	1,250,000,000	1,300,000,000	1,400,000,000
																						Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan	4	4	4	4	552,002,886	579,603,029	608,583,180	639,012,339
											Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Rumusan kebijakan Fasilitasi Daerah yang dikeluarkan	(Jumlah Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan / Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan yang dikeluarkan) X 100%	75%	75%	75%	75%	6,700,000,000.00	7,050,000,000.00	7,400,000,000.00	7,750,000,000.00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen	2	2	2	2	6,000,000,000	6,250,000,000	6,500,000,000	6,750,000,000
																						Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen	15	17	20	22	200,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000
																						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Jumlah Laporan	6	6	6	6	500,000,000	550,000,000	600,000,000	650,000,000

MENGETAHUI
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

DRS. MUHAMMAD SOLEH, M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640324 198903 1 008

PANGKALPINANG, JUNI 2022
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,

KURNIAWAN, S.T.,M.T
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731006 200003 1 002

FORM 4

1,151

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD Setda	Melakukan Perhitungan Survey	82	83	84	85	99,978,300,000	143,463,530,000	157,808,883,000	173,588,771,300	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan SETDA	Nilai hasil survey untuk pelayanan Administrasi Keuangan Yang di Laksanakan	82	83	84	85	42,607,794,954	46,868,574,449	51,555,431,894	56,710,975,084	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai x 14 bulan	275	285	292	299	42,478,194,954	46,726,014,449	51,398,615,894	56,538,477,484	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang	JA Analis Remunerasi	Restian Salim, SE
																							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Menangani Surat masuk dan Penyiapan Berkas Hasil Pemeriksaan)	Jumlah Berkas Pengadministrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasi an Keuangan	Azatilaila
																																		Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Mengetik Surat Keluar dan Pengarsipan)	Jumlah Berkas Pengadministrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Verifikator Keuangan	Ananda Pasha Savira, Amd.Ak
																																		Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Membantu Penginputan SPM)	Jumlah Berkas Pengadministrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Verifikator Keuangan	Endro Yohanes, A.Md.Ak
																																		Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Penomoran Surat, Pengarsipan Surat & Pemilahan Berkas SPM)	Jumlah Berkas Pengadministrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JF Arsiparis Mahir	Christina A.Md
																																		Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Penginputan Berkas BP, BPP dan Pengarsipan)	Jumlah Berkas Pengadministrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Citra Arista, A.Md
																							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen dalam satu tahun	0	0	0	0					Terlaksananya Verifikasi Berkas dari Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Verifikasi Berkas dari Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Analis Pelaporan & Transaksi Keuangan	Della Fira Syahrul, SE
																																		Terlaksananya Verifikasi Berkas dari Biro Hukum dan Biro Ekbang	Jumlah Verifikasi Berkas dari Biro Hukum dan Biro Ekbang Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Verifikator Keuangan	Ananda Pasha Savira, Amd.Ak
																																		Terlaksananya Verifikasi Berkas Dari Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Biro Pemerintahan	Jumlah Verifikasi Berkas dari Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan dan Biro Pemerintahan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JF Arsiparis Mahir	Christina A.Md
																																		Terlaksananya Verifikasi Berkas Dari Biro Kesra	Jumlah Verifikasi Berkas dari Biro Kesra dalam satu tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasi an Keuangan	Azatilaila
																																		Terlaksananya Verifikasi Berkas Dari Biro Umum, Biro Pemerintahan	Jumlah Verifikasi Berkas dari Biro Umum dan Biro Pemerintahan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Verifikator Keuangan	Endro Yohanes, A.Md.Ak
																							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen dalam satu tahun									Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SETDA	Jumlah Berkas Dalam Satu tahun	Jumlah Berkas	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Citra Arista, A.Md
																							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan dalam satu tahun	1	1	1	1	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Berkas Laporan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Analis Pelaporan & Transaksi Keuangan	Della Fira Syahrul, SE
																																		Terlaksananya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Berkas Laporan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Verifikator Keuangan	Endro Yohanes, A.Md.Ak

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
																							Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen dalam satu tahun	3	3	3	3					Terlaksananya Berkas Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Berkas Tanggapan Pemeriksaan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Bendahara (Pengeluaran Setda)	Okta Lusianti, SE
																																			Terlaksananya Berkas Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Berkas Tindak Lanjut Pemeriksaan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Keuangan	Azatilaila
																							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan dalam satu tahun	18	18	18	18	29,600,000	32,560,000	35,816,000	39,397,600	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Berkas Laporan Keuangan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Bendahara (Pengeluaran Setda)	Okta Lusianti, SE
																																			Terlaksananya Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Berkas Laporan Keuangan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Analis Pelaporan & Transaksi Keuangan	Della Fira Syahrul, SE
																							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dalam satu tahun									Terlaksananya Realisasi Anggaran Dokumen Pelaporan	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Dokumen Pelaporan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Bendahara (Pengeluaran Setda)	Okta Lusianti, SE
																																			Terlaksananya Realisasi Anggaran Analisis Prognosis	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Dalam Satu tahun	Jumlah Berkas	JA Analis Pelaporan & Transaksi Keuangan	Della Fira Syahrul, SE
											3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Teradministrasi Sesuai Dengan Peraturan	Hitung Barang Milik Daerah Yang Teradministrasi Sesuai Peraturan	82	83	84	85	178,200,000	196,020,000	215,622,000	237,184,200	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan dalam satu tahun	0	0	0	0					Terlaksananya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SETDA	Jumlah Berkas Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SETDA Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengelola Pemanfaat Barang Milik Daerah	Swara Legiono, A.Md
																							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen dalam satu tahun	0	0	0	0					Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah SETDA	Jumlah Berkas Pengamanan Barang Milik Daerah SETDA Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Teknisi Sarana dan Prasarana	Ilham Priyadi
																							Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan dalam satu tahun	0	0	0	0					Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah pada SETDA	Jumlah Berkas Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah pada SETDA Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengelola Pemanfaat Barang Milik Daerah	Swara Legiono, A.Md
																							Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan dalam satu tahun	0	0	0	0					Tersedianya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SETDA	Jumlah Berkas Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SETDA Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengelola Pemanfaat Barang Milik Daerah	Swara Legiono, A.Md
																							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan dalam satu tahun	0	0	0	0					Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SETDA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SETDA Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengelola Pemanfaat Barang Milik Daerah	Swara Legiono, A.Md
																							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan dalam satu tahun	12	12	12	12	178,200,000	196,020,000	215,622,000	237,184,200	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SETDA	Jumlah Berkas Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SETDA Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengelola Pemanfaat Barang Milik Daerah	Swara Legiono, A.Md
																							Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen dalam satu tahun	0	0	0	0					Tersedianya Pemanfaatan Barang Milik Pada SETDA	Jumlah Berkas Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada SETDA Dalam satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengelola Pemanfaat Barang Milik Daerah	Swara Legiono, A.Md
											4	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Kenaikan pendapatan 2,5%	Perhitungan Survey					10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen dalam satu tahun	0	0	0	0					Terlaksananya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Berkas Pengelolaan Tretribusi Daerah Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Bendahara (Penerimaan OPD)	Fitris

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
																							Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Derah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Derah	Jumlah Dokumen dalam satu tahun									Terlaksananya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	JumlahBerkas Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Bendahara (Penerimaan OPD)	Fitris
																							Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	JumlahLaporan dalam satu tahun	0	0	0	0					Tersedianya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	JumlahBerkas Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Bendahara (Penerimaan OPD)	Fitris
																							Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data dalam satu tahun	1	1	1	1	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Terlaksananya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Berkas Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Bendahara (Penerimaan OPD)	Fitris
																							Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan dalam satu tahun	1	1	1	1	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Tersedianya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Berkas Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Bendahara (Penerimaan OPD)	Fitris
																							Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen dalam satu tahun	0	0	0	0					Terlaksananya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Berkas Ketetapan Retribusi Daerah Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Bendahara (Penerimaan OPD)	Fitris
																							Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan dalam satu tahun	1	1	1	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Terlaksananya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Berkas Pengelolaan Retribusi Daerah Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Bendahara (Penerimaan OPD)	Fitris
											5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Nilai Hasil Survey Untruk Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang di Laksanakan	82	83	84	85	1,016,000,000	1,111,000,000	1,222,100,000	1,344,310,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Pengelolaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit dalam satu tahun	5	0	0	0	6,000,000	0	0	0	Terlaksananya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Berkas Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Tata Usaha	Riaz Belaputra S.Tr.IP
																							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Jumlah paket dalam satu tahun	1	1	1	1	500,000,000	550,000,000	605,000,000	665,500,000	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Tterlaksanan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengadministrasi Umum	Mentari Rifiana
																							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen dalam satu tahun	0	0	0	0					Tersedianya Pendataan Kepegawaian	Jumlah Berkas Pendataan Kepegawaian Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengadministrasi Umum	Zulmawati
																																			Tersedianya Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Berkas Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Berkas	Analis Tata Usaha	Riaz Belaputra S.Tr.IP
																							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen dalam satu tahun	0	0	0	0					Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Berkas Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JF Arsiparis Mahir	Rini Andriani, A.Md
																							Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen dalam satu tahun	0	0	0	0					Tersedianya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Berkas Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Tata Usaha	Riaz Belaputra S.Tr.IP
																							Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun yang Dipulangkan	Jumlah Orang dalam satu tahun	0	0	0	0									
																							Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan dalam satu tahun	0	0	0	0									

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
																							Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang dipindah Tugaskan	Jumlah Orang dalam satu tahun	0	0	0	0									
																							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai dalam satu tahun	20	20	20	20	150,000,000	165,000,000	181,500,000	199,650,000	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JF Arsiparis Ahli Pertama	Mirnanda Analisa, S.AP
																							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang dalam satu tahun	20	20	20	20	150,000,000	165,000,000	181,500,000	199,650,000	Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundang/IUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Tata Usaha	Riaz Belaputra S.Tr.IP
																							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang dalam satu tahun	10	10	10	10	210,000,000	231,000,000	254,100,000	279,510,000	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	STAFF	JF Arsiparis Mahir Rini Andriani, A.Md
											6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Hasil Survey Untuk Pelayanan Administrasi Umum Yang Disediakan Pada Tahun Tersebut	82	83	84	85	16,738,957,250	18,412,852,975	20,254,138,273	22,279,552,100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket dalam satu tahun	12	12	12	12	650,000,000	715,000,000	786,500,000	865,150,000	Terlaksananya Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Berkas Pengadaan Komponen Instalasi Listrik Yang Dibeli Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Fargianto
																																			Terlaksananya Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Beugenvile	Jumlah Berkas Pengadaan Komponen Instalasi Listrik Yang Dibeli Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Teknisi Peralatan Kantor	KA Goffan Apriandus
																							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK,Bahan Komputer, Alat & Bahan u Kelengkapan kantor Lainnya)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dalam satu tahun	12	12	12	12	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Berkas Penyediaan Peral dan Perlengkapan Kantor Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Fargianto
																																			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Bougenville	Jumlah Berkas Penyediaan Peral dan Perlengkapan Kantor Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengelola Keuangan	Fitri Anggriyani, A.Md
																							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Perabot Kantor)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Jumlah Paket dalam satu tahun	1	1	1	1	190,000,000	209,000,000	229,900,000	252,890,000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Berkas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengelola Sarana dan Prasarana RT Dinas	Maulida, A.Md
																																			Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Bougenville	Jumlah Berkas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Boeuganvile Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JFU Penyusun Kebutuhan RT dan Perlengkapan	Lota Andreni, S.Mn
																							Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Tabung Gas dan Pakan Natura)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket dalam satu tahun	12	12	12	12	90,000,000	99,000,000	108,900,000	119,790,000	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Berkas Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengelola Sarana dan Prasarana RT Dinas	Maulida, A.Md
																																			Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik kantor di Bougenville	Jumlah Berkas Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pranata Jamuan	Agustiar
																							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Bahan Cetak)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket dalam satu tahun	12	12	12	12	450,000,000	495,000,000	544,500,000	598,950,000	Tersedianya Pelayanan Administrasi umum Bahan Cetakan	Jumlah Berkas Pelayanan Administrasi umum Bahan Cetakan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Fargianto

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
																																		Tersedianya Pelayanan Administrasi umum (ATK, Cetakan dan Penggandaan) di Bougenville	Jumlah Berkas Pengadaan ATK Barang Cetakan dan Penggandaan) Dalam Satu Tahun di Beugenvile	Jumlah Berkas	STAFF	Rustam
																							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Surat Kabar/Majalah)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah dokumen dalam satu tahun	12	12	12	12	180,000,000	198,000,000	217,800,000	239,580,000	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Berkas Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengelola Sarana dan Prasarana RT Dinas	Maulida, A.Md
																							Penyediaan Bahan/Material (ATK, Kertas & Cover, Bahan Komputer)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket dalam satu tahun	12	12	12	12	850,000,000	935,000,000	1,028,500,000	1,131,350,000	Terlaksananya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Fargianto
																																		Terlaksananya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Tersedia di Bougenville Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengelola Surat	Wiwid Aswan, A.Md
																							Fasilitasi Kunjungan Tamu (Suvenir, Pakan Natera, Makmin Jamuan Tamu, Makmin Aktifitas Lap, Sewa Hotel & Perjadin)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Jumlah Paket dalam satu tahun	12	12	12	12	8,128,957,250	8,941,852,975	9,836,038,273	10,819,642,100	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kebutuhan Makan MInum Tamu di Bougenville)	Jumlah Berkas Fasilitasi Kunjungan Tamu (Jumlah Berkas Kebutuhan Makan Minum Tamu Beugenvile) Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pranata Jamuan	Gugun Prianto
																																		Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Pelayanan Tamu VVIP Bandara)	Jumlah Berkas Fasilitasi Kunjungan Tamu (Pelayanan Tamu VVIP Bandara) Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pranata Jamuan	Niziz Edwin
																																		Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kendaraan Dinas)	Jumlah Berkas Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kendaraan Dinas) Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JFU Penata Kendaraan Dinas	Yul Pajri, SE
																																		Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kendaraan Dinas)	Jumlah Berkas Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kendaraan Dinas) Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JFU Penata Kendaraan Dinas	Nuziardi, SE
																																		Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kendaraan Dinas)	Jumlah Berkas Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kendaraan Dinas) Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pemeliharaan Kendaraan	Ruzidani
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal SETDA	Jumlah Survey yang di laksanakan dalam satu tahun	82	83	84	85					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Makmin Rapat, Perjadin Biasa, Perjadin Luar Negeri)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporan yang dihasilkan dalam satu tahun	12	12	12	12	6,000,000,000	6,600,000,000	7,260,000,000	7,986,000,000	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Administrasi Persetujuan Atasan Perjalanan Dinas)	Jumlah Berkas Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jumlah Berkas Persetujuan Atasan Perjalanan Dinas SETDA (ST, Visum, dan Kartu Kendali)) Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Analis Keuangan	Eddy Subianto, SE
																																		Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Administrasi Perjalanan Dinas)	Jumlah Berkas Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jumlah Administrasi Perjalanan Dinas SETDA (Penomoran, Pengarsipan, Hitungan Biaya, Kwitansi, Kelengkapan Berkas) Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasi Keuangan	Zulfitriani
															82	83	84	85					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen dalam satu tahun	0	0	0	0					Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SETDA	Jumlah Berkas Penatausahaan Arsip Dinamis pada SETDA	Jumlah Berkas	JF Arsiparis Mahir	Rini Andriani, A.Md

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
																							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dalam satu tahun	0	0	0	0					Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SETDA	Jumlah Berkas Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SETDA	Jumlah Berkas	Pengadministrasi Umum	Mentari Rifiana
											7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang Diadakan	Hitung Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Yang Diadakan	82	83	84	85	6,937,750,000	41,126,525,000	45,239,177,500	49,763,095,250	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah unit dalam satu tahun	3	3	3	3	900,000,000	990,000,000	1,089,000,000	1,197,900,000	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasi an Sarana dan Prasarana	Muhamad Rinto
																							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah unit dalam satu tahun	4	4	4	5	3,280,000,000	3,608,000,000	3,968,800,000	4,365,680,000	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasi an Sarana dan Prasarana	Muhamad Rinto
																							Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	Jumlah unit dalam satu tahun	0	0	0	0					Terlaksananya Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasi an Sarana dan Prasarana	Muhamad Rinto
																							Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah unit dalam satu tahun	0	3	3	3	-	33,000,000,000	36,300,000,000	39,930,000,000	Terlaksananya Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasi an Sarana dan Prasarana	Muhamad Rinto
																							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah paket dalam satu tahun	3	3	3	3	322,000,000	354,200,000	389,620,000	428,582,000	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasi an Sarana dan Prasarana	Muhamad Rinto
																							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit dalam satu tahun	50	50	55	60	1,345,750,000	1,480,325,000	1,628,357,500	1,791,193,250	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasi an Sarana dan Prasarana	Muhamad Rinto
																							Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit dalam satu tahun	5	5	5	5	40,000,000	44,000,000	48,400,000	53,240,000	Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasi an Sarana dan Prasarana	Muhamad Rinto
																							Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud Yang Disediakan	Jumlah unit dalam satu tahun	0	0	0	0					Terlaksananya Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasi an Sarana dan Prasarana	Muhamad Rinto
																							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit dalam satu tahun	0	1	1	1	-	495,000,000	544,500,000	598,950,000	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasi an Sarana dan Prasarana	Muhamad Rinto
																							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit dalam satu tahun	3	3	3	3	737,000,000	810,700,000	891,770,000	980,947,000	Teralaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasi an Sarana dan Prasarana	Muhamad Rinto
																							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit dalam satu tahun	3	3	3	3	313,000,000	344,300,000	378,730,000	416,603,000	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasi an Sarana dan Prasarana	Muhamad Rinto
											8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hitung Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82	83	84	85	14,340,500,000	15,774,550,000	17,352,005,000	19,087,205,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan dalam satu tahun	12	12	12	12	40,500,000	44,550,000	49,005,000	53,905,500	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Berkas/Surat/Barang Yang Terkirim dan Benda Pos Yang di Beli Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengadministrasi Umum	Mentari Rifiana
																							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan dalam satu tahun	12	12	12	12	4,500,000,000	4,950,000,000	5,445,000,000	5,989,500,000	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Berkas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tesedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Tata Usaha	M. Aziz Harahad, SH

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
																							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan dalam satu tahun	12	12	12	12	2,000,000,000	2,200,000,000	2,420,000,000	2,662,000,000	Terlaksananya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Berkas Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Tata Usaha	Rachmad Harjono
																							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan dalam satu tahun	12	12	12	12	7,800,000,000	8,580,000,000	9,438,000,000	10,381,800,000	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Ketata Usahaan Pimpinan KDH)	Jumlah Berkas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Tata Usaha	Yanti, S. AP
																																			Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Ketata Usahaan Pimpinan Asisten)	Jumlah Berkas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Tata Usaha	Sri Indina Gaus, SE
																																			Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Pengelolaan Arsip Inaktif)	Jumlah Berkas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia (Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip Inaktif, Daftar Arsip Iinaktif Usul Musnah dan Laporan Pelayanan Arsip Dinamis) Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JF Arsiparis Ahli Pertama	Mirnanda Analisa, S.AP
																																			Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Administrasi Keuangan Lingkungan Biro /TPP)	Jumlah Berkas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia (Berkas Administrasi Keuangan Lingkup Biro /TPP) Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Tata Usaha	Riaz Belaputra, S.Tr.IP
																																			Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tersedianya Gaji PHL)	Jumlah Berkas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia (Berkas Honorarium PHL Yg Dibayar Setiap Bulan) Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Tata Usaha	Agus Feriadi, S.Sos
											9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Hitung Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	82	83	84	85	9,565,250,000	10,521,775,000	11,573,952,500	12,731,347,750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan dalam satu tahun	16	16	16	16	897,705,500	987,476,050	1,086,223,655	1,194,846,021	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Berkas Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Heryanto
																							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan dalam satu tahun	78	83	88	90	2,633,869,150	2,897,256,065	3,186,981,672	3,505,679,839	Terlaksananya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Berkas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Heryanto
																							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Jumlah Unit dalam satu tahun	0	0	0	0					Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Berkas Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Heryanto
																							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Jumlah Unit dalam satu tahun	0	0	0	0					Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Berkas Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Heryanto
																							Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah mebel dalam satu tahun	100	120	140	150	180,000,000	198,000,000	217,800,000	239,580,000	Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Berkas Mebel yang dipelihara Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Andi Yunanto
																							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam satu tahun	50	55	60	65	895,925,745	985,518,320	1,084,070,151	1,192,477,167	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara (Sond System,Lift,Mesin Disel, Peralatan dan Mesin Lainnya) Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Eidil Edha

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
																																		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara (Instalasi Listrik, Mebel, Pemasangan Bola Lampu, Peralatan dan Mesin Lainnya Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Andi Yunanto
																																		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang dipelihara (Genset, Instalasi Listrik, Pompa Air, Peralatan dan Mesin Lainnya) Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Ahmad Umar
																							Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Unit dalam satu tahun	0	0	0	0					Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Berkas Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Ahmad Umar
																							Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Unit dalam satu tahun	0	0	0	0					Tersedianya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Berkas Aset Tak Berwujud yang Terpelihara Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Andi Yunanto
																							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu tahun	6	6	6	6	3,613,719,605	3,975,091,566	4,372,600,722	4,809,860,794	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Berkas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Eidil Edha
																							Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu tahun	6	6	6	6	1,094,030,000	1,203,433,000	1,323,776,300	1,456,153,930	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Berkas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Muhamad Rinto
																							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu tahun	4	4	4	4	250,000,000	275,000,000	302,500,000	332,750,000	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Berkas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Muhamad Rinto
																							Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah Yang Dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi	Luas Tanah Yang Dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi Dalam satu Tahun	0	0	0	0					Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Berkas Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Muhamad Rinto
											11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan SETDA	Nilai hasil survey untuk pelayanan Administrasi Keuangan Yang di Laksanakan	82	83	84	85	1,554,610,296	1,710,071,326	1,881,078,458	2,069,186,304	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam satu tahun	14	14	14	14	139,610,296	153,571,326	168,928,458	185,821,304	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Analis Remunerasi	Restian Salim, SE
																							Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan dalam satu tahun	2	2	2	2	85,000,000	93,500,000	102,850,000	113,135,000	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Paket	JA Analis Remunerasi	Restian Salim, SE

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
																							Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam satu tahun	6	6	6	6	80,000,000	88,000,000	96,800,000	106,480,000	Tersedianya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Satu Tahun	Jumlah Orang	JA Analis Remunerasi	Restian Salim, SE
																							Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam satu tahun	12	12	12	12	1,250,000,000	1,375,000,000	1,512,500,000	1,663,750,000	Terlaksananya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Satu Tahun	Jumlah Orang	JA Analis Remunerasi	Restian Salim, SE
											12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Tangga SETDA	Hitung Jumlah Pelayanan Rumah Tangga SETDA	82	83	84	85	1,905,237,500	2,095,761,250	2,305,337,375	2,535,871,113	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan dalam satu tahun	12	12	12	12	879,000,000	966,900,000	1,063,590,000	1,169,949,000	Tersedianya Layanan Pengemudi Untuk KDH	Jumlah Berkas Pelayanan Pimpinan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengemudi	Alfian Suganda
																																			Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengelola Sarana dan Prasarana RT Dinas	Maulida, A.Md
																							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan dalam satu tahun	12	12	12	12	212,137,500	233,351,250	256,686,375	282,355,013	Tersedianya Layanan Pengemudi Untuk WKDH	Jumlah Berkas Pelayanan Pimpinan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Pengemudi	Yul Hendri
																																			Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengelola Sarana dan Prasarana RT Dinas	Maulida, A.Md
																							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan dalam satu tahun	12	12	12	12	814,100,000	895,510,000	985,061,000	1,083,567,100	Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Berkas Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengelola Sarana dan Prasarana RT Dinas	Maulida, A.Md
											13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal SETDA	Hitung Jumlah Pelayanan Internal Setda	82	83	84	85	1,890,000,000	2,079,000,000	2,286,900,000	2,515,590,000	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan dalam satu tahun	12	12	12	12	130,000,000	143,000,000	157,300,000	173,030,000	Tersedianya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Berkas Materi Pimpinan yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Protokol	Bagas Yogaswara Pranata S.Tr.Jp
																																			Tersedianya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Berkas Materi Pimpinan yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Protokol	Ayu Restu Priyanti, S.STP
																																			Tersedianya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Berkas Materi Pimpinan yang Tersedia Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Protokol	Deni Faturrahman, S.STP
																							Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan dalam satu tahun	12	12	12	12	1,160,000,000	1,276,000,000	1,403,600,000	1,543,960,000	Tersedianya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Berkas Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	JA Analis Tata Usaha	Agus Feriadi, S.Sos
																							Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan dalam satu tahun	12	12	12	12	600,000,000	660,000,000	726,000,000	798,600,000	Tersedianya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Berkas Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Protokol	Agung Kusumah, SH
																																			Tersedianya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Berkas Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Protokol	Evans Prasetya, S.STP
											14	**Fasilitasi Keprotokolan**	Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol SETDA	Hitung Jumlah Pelayanan Protokol SETDA	82	83	84	85	3,234,000,000	3,557,400,000	3,913,140,000	4,304,454,000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan dalam satu tahun	12	12	12	12	1,000,000,000	1,100,000,000	1,210,000,000	1,331,000,000	Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Berkas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Protokol Muda	Syahrial, SE

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
																																		Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Berkas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Protokol	Evans Prasetya, S.STP
																																		Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Berkas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Protokol	Susan Haryanti, SE
																																		Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Berkas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Protokol	Ariyati Windy Astuti, S.I.KOM
																							Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan dalam satu tahun	12	12	12	12	800,000,000	880,000,000	968,000,000	1,064,800,000	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Berkas Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Satu Tahun Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Protokol	Purnama Putri S.IP
																																		Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Berkas Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Protokol	Septian Abdillah Harys, S.Tr.IP
																							Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan dalam satu tahun	12	12	12	12	1,434,000,000	1,577,400,000	1,735,140,000	1,908,654,000	Tersedianya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Berkas Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Analis Protokol	JFT PRANATA HUMAS PERTAMA Randhica, S.I.Kom
																																		Tersedianya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Berkas Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengadministrasi an Umum	Qomaroedin
																																		Tersedianya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Berkas Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Dalam Satu Tahun	Jumlah Berkas	Pengadministrasi an Umum	Permana Yusuf Hamidy

MENGETAHUI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Drs. YUNAN HELMI,M Si
Pembina Utama Madya / IV d
NIP 196705051992031009

PANGKALPINANG, JUNI 2022

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BURHANUDDIN,S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19700504 200212 1 004

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM				PAGU INDIKATIF PROGRAM				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KEGIATAN				PAGU INDIKATIF KEGIATAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR SUBKEGIATAN				PAGU INDIKATIF SUBKEGIATAN				S T A F F	INDIKATOR STAFF	FORMULASI INDIKATOR STAFF	SUMBER INDIKATOR STAFF	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					